

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Acuan Teoritik

##### 1. Definisi Pengorganisasian

Makna pengorganisasian tidak lepas dari kata organisasi yang merupakan kata benda dari pengorganisasian itu sendiri, yang memiliki arti dalam bahasa Inggris “*Organization*” yaitu “hal yang mengatur” dan kata kerjanya “*organizing*” berasal dari bahasa latin “*organizare*” yang mengatur atau menyusun.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh ahli, antara lain: George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang *organizing* sebagai berikut, yaitu:

*“Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority delegated to each respective activity.”*

“Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mohyi Ach., *Teori dan Perilaku Organisasi*, (Malang : UMM Press, 1999), h.1

<sup>2</sup> Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h.38

Kemudian James D. Mooney yaitu setiap bentuk perkumpulan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester I Barnard yaitu suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.<sup>3</sup>

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi dalam manajemen, setelah fungsi perencanaan, maka hal penting yang harus dilakukan oleh seorang manajer adalah melakukan fungsi *Organizing* yaitu pengorganisasian. Setelah rencana-rencana disusun, maka tugas seorang manajer adalah mengorganisasi sumber daya manusia dan sumber daya fisik dan memanfaatkannya dengan tepat.

Menurut Handoko, sebagaimana dikutip oleh Usman bahwa Pengorganisasian adalah:

“Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pengorganisasian merupakan pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya”.<sup>4</sup>

Demikian juga kata Winardi bahwa pengorganisasian adalah aktifitas yang mengusahakan saling berhubungannya pekerjaan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dapat memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu

---

<sup>3</sup> Amrullah dan Haris Budiyo, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), Cet. Ke-2, h.166-167

<sup>4</sup> Husaini Usman, *Op.Cit.*, h.141

dalam kondisi lingkungan tertentu dengan tujuan untuk mencapai target atau tujuan tertentu.<sup>5</sup>

Berikutnya adalah sebagaimana kata Nanang Fatah bahwa pengorganisasian merupakan proses membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi<sup>6</sup>

Sedangkan menurut T. Hani Handoko pengorganisasian adalah proses dan kegiatan untuk:

1. Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan
3. Penugasan tanggungjawab tertentu, dan
4. Mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan<sup>7</sup>

Pengorganisaian memiliki arti suatu proses sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya modal atau keuangan digabungkan menjadi satu semua yang terlibat dalam organisasi tertentu dan

---

<sup>5</sup> Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung: 1983), h. 215

<sup>6</sup> Nanang Fattah, *Landasan manajemen pendidikan*. Cet. VII. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996), h. 71.

<sup>7</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1986), Edisi kedua. h.21

meyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi atau kelompok.<sup>8</sup>

Dalam proses pengorganisasian harus ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing sehingga terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif yang harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama-sama dalam sebuah organisasi.<sup>9</sup>

Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi<sup>10</sup>.

Dari penjabaran pendapat para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dengan perencanaan. Sebab pengorganisasian merupakan langkah-langkah operasional dan fungsional organisasi meliputi usaha-usaha departementalisasi (membagi pekerjaan berdasarkan pembagian wilayah dan wewenang kerja) yang akan menentukan spesialisasi orang-orang dalam kegiatan organisasi secara keseluruhan, termasuk di dalamnya proses kerja sama yang kuat, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penentuan

---

<sup>8</sup> Sarinah, Mardalena, *Pengantar manajemen*, (Yogyakarta:Penertib Deepublish, 2017) Cet. Pertama, h.42

<sup>9</sup> Anton Atholillah, *Dasar-dasar Manajemen Op.Cit.* hal.110

<sup>10</sup> Nanang Fattah, *Landasan manajemen pendidikan, Op.Cit.*, hal.71

orang-orang yang akan melakukan pekerjaan, pola koordinasi yang akan dibangun, dan sebagainya.

## **2. Perbedaan Pengorganisasian dan Organisasi**

Kata dan Istilah pengorganisasian dan organisasi adalah dua kata dan term yang berbeda, pengkaburan istilah pengorganisasian dengan istilah organisasi ini sering terjadi. hal ini disebabkan karena disaat mendengar istilah organisasi, maka timbul dua definisi yang lazim yaitu; pertama, ada yang mengartikan istilah organisasi yang dengan lembaga tertentu atau sistem seperti perusahaan, lembaga, sekolah, sebuah komunitas, dan lain lain sebagainya. Kedua, pengorganisasian yang diartikan sebagai proses mengatur pekerjaan, mengalokasi sumber daya, membagi sumber daya kepada anggota dengan tujuan agar organisasi mampu tercapai se efektif mungkin.<sup>11</sup> di sini dapat di simpulkan bahwa perbedaan organisasi dan pengorganisasian adalah bahwa pengorganisasian adalah proses mengorganisir dan mengatur sebuah program atau pekerjaan tertentu sedangkan organisasi adalah wadahnya, yaitu wadah dimana proses pengaturan itu dilakukan.

## **3. Prinsip-prinsip Pengorganisasian**

### **a. Prinsip Kepemimpinan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemimpin berasal dari kata pimpin yang artinya tuntun dan bimbing,<sup>12</sup> sehingga kata pemimpin diartikan penuntun dan pembimbing. Kata kepemimpinan atau

---

<sup>11</sup> Nanang Fattah, *Landasan manajemen, Op.cit*, h. 71

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/pimpin>, (diakses 25 Juli 2018 pukul 22.00 WIB)

sering disebut dengan kata *leadership* memiliki maksud dan nilai tertentu, seorang pemimpin ditandai dengan memiliki kemampuan khusus dalam sebuah organisasi atau kelompok. Seorang pemimpin dapat juga disebut dengan manajer, dan kebanyakan kita menjadi seorang pemimpin dari pada seorang manajer, atau seorang pemimpin dari pada seorang politikus. sehingga sering sekali kata *leadership* mengarah pada peran dari pada sebuah perilaku.<sup>13</sup>

Menurut Mulyadi dan Rivai dalam organisasi terdapat pihak-pihak yang saling terkait antara lain pemimpin sebagai atasan, dan pegawai atau karyawan sebagai bawahan.<sup>14</sup> Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi menurut Suranta dikarenakan pemimpin memiliki peran strategis dalam usaha mencapai tujuan organisasi sesuai visi dan misi organisasi.<sup>15</sup> Siagian mengutarakan bahwa kepemimpinan merupakan individu yang menduduki suatu jabatan tertentu dimana individu tersebut memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi perilaku orang lain yakni bawahannya untuk berfikir dan bertindak sehingga melalui perilaku yang positif tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h.273

<sup>14</sup> Mulyadi, D., Rivai V, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

<sup>15</sup> Suranta S. *Dampak Motivasi Karyawan pada Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Karyawan Bisnis*, *Jurnal Empirika* 15 (2),h.116-138

<sup>16</sup> Siagian, S. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002)

Fokus utama sebuah organisasi publik maupun organisasi bisnis adalah bagaimana upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keberhasilan suatu organisasi ditunjukkan oleh seberapa besar kinerja anggota organisasi dalam bekerja sama menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal yang sangat fundamental untuk agar orang-orang bekerja dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat memberikan pengaruhnya dan mengarahkan segala sumber daya yang ada ke arah pencapaian tujuan.

Kepemimpinan merupakan kegiatan dalam upaya mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan sebuah organisasi.<sup>17</sup> Dikatakan sebagai seorang pemimpin jika memiliki kemampuan mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan,<sup>18</sup> menasehati menyuruh, membimbing, memerintah, melarang orang lain agar dapat bekerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan setidaknya mencakup tiga hal yang saling berhubungan, yaitu adanya pemimpin, ada pengikut serta adanya situasi organisasi tempat pemimpin dan pengikut berinteraksi satu sama lain.<sup>19</sup>

Berhasil atau tidaknya organisasi ditentukan oleh seorang pemimpin. Ada sebuah pendapat yang tidak berlebihan bahwa

---

<sup>17</sup> R.B Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2005), h.25

<sup>18</sup> Herdiyanti Rise P. *Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Karyawan*, Jurnal Wacana Vol. 13 No.40 , ISSN. 1411-0199, 04 Oktober 2010

<sup>19</sup> Sakdiah, *Manajemen Organisasi Islam Suatu Pengantar*, (Banda Aceh: Dakwah Ar-raniry Press, 2005), h.115

pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi dalam pekerjaan, hal ini adalah ungkapan yang secara substansi diartikan dengan mendudukkan posisi pemimpin dalam suatu organisasi pada posisi yang terpenting. Manusia membutuhkan kepemimpinan, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan- kelebihan tertentu pada manusia. Kemampuan manusia berbeda-beda ada yang memiliki kelebihan dan ada yang terbatas kemampuannya dalam memimpin.

### 1) **Model dan Tipe Kepemimpinan**

Untuk memahami model tipe kepemimpinan secara menyeluruh maka perlu pembahasan bagaimana teori-teori yang muncul tentang model dan tipe kepemimpinan yang sudah dibangun oleh para pakar dan ilmuwan. Secara teoritis, terdapat beberapa pandangan dalam disiplin keilmuan sosial yang mengkaji tentang tipe-tipe kepemimpinan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Max Weber dalam studi sosiologisnya, dalam penelitiannya Max Weber melihat ada tiga tipe kepemimpinan yang dapat dijadikan dasar dalam kajian tentang ilmu kepemimpinan yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### a) **Kepemimpinan Tradisional**

Kepemimpinan dalam tipe ini berlandaskan pada keturunan, pemilihan pemimpin bersifat warisan, atau turun-temurun, contohnya seperti seorang putra penguasa yang menggantikan

---

<sup>20</sup> Fadjar, Malik H.A, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media), h.25

ayahnya yang telah meninggal.<sup>21</sup> Model kepemimpinan ini dipakai dalam sistem negara yang berbentuk sebuah kerajaan.

b) Kepemimpinan Karismatik

Tipe kepemimpinan karismatik ini. Menurut Ria Marginingsih yang mengutip pendapat Rabbins menyatakan bahwa teori kepemimpinan karismatik merupakan keberlanjutan dari teori atribusi. teori ini menyatakan adanya hubungan yang sangat kuat antara pemimpin dengan yang dipimpin yang disebabkan oleh pengamatan terhadap perilaku-prilaku tertentu dari seorang pemimpin.<sup>22</sup> Pendapat lain juga menjelaskan pada saat ini kebanyakan teoritikus berpendapat bahwa karisma adalah hasil dari persepsi anggota dan atribut yang dimiliki oleh seorang pemimpin dipengaruhi oleh kemampuannya yang aktual, memperhatikan kebutuhann individual dan kolektif para anggotanya.<sup>23</sup>

Model karismatik bertumpu pada nilai-nilai bawaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, sifat-sifat karismatik menjadi kekuatan khusus dalam model kepemimpinan ini. Hingga saat ini para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin yang demikian memiliki karisma, pada umumnya difahami bahwa pemimpin yang demikian memiliki

---

<sup>21</sup> *ibid.*,h.25

<sup>22</sup> Ria Marginingsih, *Kepemimpinan Karismatik Sebagai Employer Branding*, Jurnal Bisnis Darmajaya, Vol.02 No.02, Juli 2016

<sup>23</sup> Ria Marginingsih, *Op.cit.*, h.35

daya tarik yang besar dan karenanya dari model kepemimpinan demikian ini banyak sekali mempunyai pengikut.

c) Kepemimpinan Rasional

Model kepemimpinan rasional, merupakan model kepemimpinan yang berdasar pada peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> segala sesuatunya harus berdasar pada peraturan yang jelas, tidak sembarangan dan asal memberikan keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Selain diatas ada pula model lainnya adalah sebagaimana yang dikutip oleh Ary H. Gunawan dari Lewin, Leppit dan White dalam sebuah studi yang dilakukan bahwa tiga tipe kepemimpinan sebagai mana berikut:

a) Kepemimpinan Otoriter

Model dan tipe kepemimpinan otoriter yaitu tipe kepemimpinan yang memposisikan kekuasaan penuh pada penguasa, keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa tidak dapat di ganggu gugat, dan rakyat atau bawahan harus tunduk dan patuh terhadap keputusan dan kekuasaan. Model kepemimpinan ini menjadikan bawahan tidak dapat peluang untuk berinisiatif dan mengeluarkan pendapat. Segala perintah dan instruksi pimpinan tidak boleh di tafsirkan dengan hal-hal tertentu, akan tetapi harus dilaksanakan secara konsekuen tanpa kekeliruan.

---

<sup>24</sup> Fadjar, Malik, *Op.cit.*,h.25

b) Kepemimpinan *Laissez Faire*

Tipe kepemimpinan *laissez faire* ini adalah kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Model kepemimpinan ini ditandai dengan memberikan kebebasan kepada rakyat atau bawahannya untuk mengambil keputusan. segala hal dapat berjalan dengan sendiri-sendiri sesuai kehendak anggotanya, sedangkan sang pemimpin hanya bertugas laksana seorang panasehat. kekurangan model kepemimpinan ini adalah sasaran kerja menjadi tidak fokus dan simpang siur.

c) Kepemimpinan Demokratis

Kepemimpinan demokratis yaitu dengan memposisikan manusia sebagai faktor penentu dan terpenting. tipe kepemimpinan ini merupakan tipe kepemimpinan yang terbuka, segala sesuatu diambil dengan cara musyawarah dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip saling menghargai dan menghormati.<sup>25</sup> Tipe kepemimpinan ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk mulia di dunia
- 2) Selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari bawahannya

---

<sup>25</sup> Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro* (Jakarta: PT.RIneka Cipta,2002, h.220-221

- 3)Terbuka dan senang mendapat masukan, pendapat bahkan kritik dari bawahanya
- 4)Senantiasa berusaha mengedepankan kerjasama dalam upaya pencapaian tujuan yang telah disepakati
- 5)Senantiasa memberikan toleransi atas kesalahan yang terjadi kemudian diperbaiki untuk tidak diulang kembali di kemudian hari<sup>26</sup>

Demikian model-model kepemimpinan secara teoritis, Model dan tipe kepemimpinan diatas berjalan sesuai dengan kondisi waktu dan tempat yang sesuai, terdapat di berbagai oraganisasi yang berbeda pula. Sedemikian pentingnya kepemimpinan menjadi prinsip utama dalam pengorganisasian.

#### **b. Prinsip Kekuasaan, Wewenang dan Tanggung Jawab**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kekuasaan berasal dari kata kuasa yang artinya adalah mengurus dan memerintah.<sup>27</sup> Secara istilah diungkapkan oleh Robert A. Dahl bahwa kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, seperti hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan, dan kekuatan fisik.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Soleh Subagja, *Kepemimpinan Profetik( Spirit Implementasi Model Kepemimpinan di Lembaga Pendidikan Islam*, Jurnal PROGRESIVA, Vol 3, No.1 Januari -Juni 2010

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Op.cit.*

<sup>28</sup> Robert Dahl "Power" *Encyclopedia of Social Sciences*. Eds. David L. Sills, Vol.12,1968, h.405-415

Berbeda pernyataan dalam karyanya yang lain seperti dalam *Modern Political Analysis*, bahwa kekuasaan adalah sejenis pengaruh yang disertai dorongan hukuman yang melanggar. Pendapat yang mirip sebagaimana yang kemukakan oleh Harold D. Lasswell bahwa melalui pendekatan psikologis, Dia memandang kekuasaan sebagai sebuah hubungan kemanusiaan yang diharapkan dapat terwujud dan dalam taraf praktiknya diberikan hukuman yang tegas.<sup>29</sup>

Menurut Miriam Budiarjo bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku.<sup>30</sup> Senada dengan pendapat Abdul Mu'in Salim bahwa kekuasaan adalah kemampuan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu; kekuatan (selain badan atau benda); kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus) sesuatu, sebagaimana bahwa orang yang diberi kewenangan mampu dan sanggup untuk mengurus sesuatu, orang yang memiliki pengaruh, gengsi, kesaktian dan lainnya karena jabatannya atau martabatnya.<sup>31</sup> Definisi ini mempunyai makna sosiologis, dan sangat realistis mengingat bahwa manusia secara fitrahnya mempunyai berbagai keinginan dan tujuan yang ingin diraihnya. Dalam konteks ini, demikian pula yang terjadi pada kekuasaan yang dimiliki oleh negara, tidak

---

<sup>29</sup> Lihat Harold D. Lasswell, *Psychology and Political Science in the U.S.A*, dalam UNESCO, *Contemporary Political Science*, (Liege: G. Thone, 1950), h. 534.

<sup>30</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), h. 10.

<sup>31</sup> Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah, Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2--1) Cet ke3, h.52

terbatas dalam kehidupan antar manusia di bidang politik semata-mata, serta tidak pula terbatas pada negara yang baru tumbuh, tetapi, di bidang hukum pun kekuasaan senantiasa bergandengan<sup>32</sup>

Kekuasaan ini melekat pada diri manusia yang merupakan makhluk sosial. Secara fitarah, manusia telah memiliki keinginan untuk berkuasa. Kemampuan yang dimiliki manusia dalam sebuah kelompok serta dapat mempengaruhi orang lain dalam interaksinya secara kolektif dan mampu menibulkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh kelompok yang berkuasa tersebut.<sup>33</sup>

Menurut Max Weber sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, bahwa kekuasaan diartikan dengan kesempatan dari seseorang atau kelompok dalam rangka menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Berbeda dengan Mac Iver yang merumuskan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Op.cit*, h. 10.

<sup>33</sup> Deden Faturahman dan Wawan Sobri, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 21

<sup>34</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R . Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet. ke4, h. 115

Pengertian-pengertian diatas merupakan hasil pemikiran para ilmuan Barat yang hingga saat masih dipakai dalam berbagai kajian ilmiah tentang kepemimpinan dan kekuasaan.

Selanjutnya adalah wewenang merupakan dasar dalam bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan/aktifitas suatu perusahaan. Tanpa adanya wewenang orang dalam perusahaan tidak dapat bertindak apapun. Sebagaimana arti wewenang yang diungkapkan oleh G. R. Terry dalam M. Nurzen, menyatakan bahwa:

*“Authority is the official and legal right to command by others and enforce compliance”*

Artinya: Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain, supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.<sup>35</sup>

Kemudian Louis A Allen juga mengungkapkan arti wewenang dalam Schoenbrod, D. sebagai berikut:

*“Authority is the sum of the power and rights entrusted to make possible the performance of the work delegated.*

Artinya: Wewenang adalah sejumlah kekuasaan (powers) dan hak (rights) yang didelegasikan pada suatu jabatan.<sup>36</sup>

Malayu S.P Hasibuan juga mengungkapkan bahwa Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu; wewenang

---

<sup>35</sup> Nurzen, M. (2016). *Wewenang Dan Tanggung Jawab Berbasis Alqur'an Dan Hadits*. Jurnal At-Tasyrih, 2(1), h.1-10.

<sup>36</sup> Schoenbrod (2008). *Power without responsibility: How Congress abuses the people through delegation*. Yale University Press.h.152

merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.<sup>37</sup>

Berdasarkan arti dan makna wewenang yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa wewenang (*authority*) merupakan hak untuk memerintah (dalam organisasi formal maupun non formal) yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak. Telah dipahami bahwa dalam konsep wewenang/*authority* terdapat *power and right*, tetapi dalam *power* belum tentu terdapat *authority and right*. Menurut Henry Fayol, wewenang adalah hak untuk memerintah (dalam organisasi formal) dan kekuatan (*power*) membuat manajer dipatuhi dan ditaati. Kemudian Chester I. Barnard juga menegaskan konsep yang berbeda bahwa *authority* sama dengan *power*, *authority* adalah ciri suatu komunikasi (perintah) dalam suatu organisasi formal yang menyebabkan ia diterima oleh seseorang anggota organisasi tersebut dan perintah-perintahnya harus ditaati. Dalam wewenang selalu terdapat *power* dan *responsibility* untuk mencapai tujuan, tetapi *power* tidak selalu diikuti oleh *authority* dan *responsibility*. Jadi, *authority*-lah yang paling menjamin tercapainya tujuan, sebab *authority* menciptakan *power* dan *right*.<sup>38</sup>

Sedangkan Soerjono Seokanto menguraikan perbedaan antara wewenang dan kekuasaan, bahwa setiap kemampuan untuk

---

<sup>37</sup> Hasibuan, M. S. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2007), Edisi Revisi, Cet. Keenam, h.27

<sup>38</sup> Nurzen, *Op.cit.* h. 1-5

mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.<sup>39</sup> Selanjutnya Menurut Bagir Manan “kekuasaan” (*macht*) tidak sama artinya dengan wewenang. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*).

Ada beberapa jenis wewenang (*authority*) yang dimiliki oleh manajer atau atasan. Menurut Hasibuan dalam bukunya yang berjudul *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah* menyatakan bahwa jenis-jenis wewenang meliputi<sup>40</sup>:

- 1) *Line authority* adalah kekuasaan, hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ia berwenang mengambil keputusan, berkuasa, berhak, dan bertanggung jawab langsung untuk menyatakan keputusan tersebut. Line authority dalam struktur organisasi di simbolkan dengan garis ( \_\_\_\_\_ )
- 2) *Staff authority* adalah kekuasaan dan hak yang dimiliki hanya untuk memberikan data, informasi, dan saran untuk membantu lini, agar bekerja efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. *Staff authority*

---

<sup>39</sup> Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), h 79-80

<sup>40</sup> Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 13 Mei 2000, h.1-2

hanya membantu lini untuk menyediakan data, informasi, dan saran yang dipakai atau tidak, tergantung kepada manajer lini. Struktur organisasi *Staff authority* di simbolkan dengan garis putus-putus (- - - - -).

- 3) *Functional authority* adalah kekuasaan seorang manajer karena adanya suatu proses, praktek, kebijakan, tertentu atau soal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan oleh pegawai lain dalam bagian lain pula. Struktur organisasi *Functional authority* di gambarkan dengan garis terputus-putus dan titik(-•-•-•-•-•).
- 4) *Personality authority* adalah kewibawaan seseorang dalam berbicara, berperilaku, ketangkasan, dan kemampuan, sehingga ia dihormati oleh kawan maupun lawan.

Berbeda dengan Stoner dkk,<sup>41</sup> mengemukakan bahwa dalam banyak kantor, pimpinan menggunakan wewenang dengan membaginya menjadi beberapa jenis yaitu 1) Wewenang Lini; 2) Wewenang Staff; dan 3). Wewenang Fungsional. Kemudian selain mengkonsepkan jenis wewenang Hasibuan juga mengklasifikasi sumber-sumber wewenang (*authority*) sebagai berikut<sup>42</sup> :

---

<sup>41</sup> Stoner, A. F. James. dkk.. *Manajemen Jilid 2*. Ahli Bahasa oleh Drs. Alexander Sindoro. (Jakarta : PT Prenhallindo,1996) h.45

<sup>42</sup> Malayu Hasibuan, S. P. *Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah)* Edisi Revisi. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006) h.67

a. *Formal Authority Theory* (Teori Wewenang Formal)

Pendapat tentang wewenang formal menyebutkan bahwa wewenang adalah sesuatu yang dianugerahkan, kemudian wewenang akan ada karena seseorang diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut.

Koontz berpendapat bahwa wewenang muncul pada diri seseorang karena ia mempunyai hak atas sesuatu barang (yang diatur dalam lembaga), sebagaimana diatur oleh undang-undang, hukum, dan hukum adat yang memberikan kepada seseorang kekuasaan atas sumber-sumber kebendaan.<sup>43</sup>

b. *Acceptance Authority theory* (teori penerimaan wewenang)

Adapun teori penerimaan menyanggah bahwa wewenang dapat diberikan atau dianugerahkan. Dalam teori ini didapati bahwa wewenang seseorang akan muncul apabila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang itu dijalankan.

c. *Authority of the situation* disini, wewenang diperoleh seseorang disebabkan adanya kondisi yang menuntut untuk memegang kendali dalam organisasi.

d. *Position Authority*, Artinya adalah bahwa wewenang itu muncul karena posisi (jabatan) dalam organisasi. Dalam hal ini jabatan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku dalam lembaga atau organisasi.

---

<sup>43</sup> Koontz, H. *Essentials of Management*. (Tata Mc Graw-Hill Education.2010), h. 56

- e. *Technical Authority* (wewenang teknis), yaitu wewenang didapatkan seseorang karena memiliki keahlian khusus sebagai akibat dari pengalaman, popularitas, kemampuan mengambil sikap dan keputusan yang strategis.
- f. *Yuridis Authority* (wewenang hukum), yaitu wewenang yang diperoleh seseorang karena hasil produk hukum atau undang-undang. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek dalam Ridwan HR, menyebut wewenang atau kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>44</sup>

Dalam menjalankan wewenang, menurut Arrow, K.J. seseorang secara langsung mempunyai batas-batas tertentu dalam wewenangnya.<sup>45</sup> Batas-batas *authority (limits of authority)* tersebut diantaranya adalah:

- 1) Kemampuan jasmaniah (fisik), Yaitu dimana manajer tidak dapat memerintahkan suatu tugas kepada para bawahannya di luar kemampuan manusia.
- 2) Alamiah. Maksudnya bahwa manajer tidak dapat menugaskan para bawahannya untuk menentang kodrat alam.

---

<sup>44</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013). h 71

<sup>45</sup> Arrow, K. J. (1974). *The limits of organization*. WW Norton & Company.h.165

- 3) Teknologi, disini artinya wewenang manajer dibatasi oleh teknologi, misalnya manajer tidak dapat memerintahkan bawahannya untuk melakukan tugas-tugas yang belum tercapai oleh teknologi dan ilmu pengetahuan, seperti membuat cabang perusahaan di bulan.
- 4) Pembatasan ekonomi, bahwa wewenang dibatasi oleh keadaan ekonomi, misal manajer tidak dapat memerintahkan atau memaksakan kehendaknya terhadap harga-harga pasar dan persaingan.
- 5) Partnership agreement, yaitu wewenang manajer dibatasi oleh rekannya, misal oleh Dewan Komisaris.
- 6) Lembaga, yaitu bahwa wewenang manajer dibatasi oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kebijakan, dan prosedur lembaga tersebut.
- 7) Pembatasan hukum, Artinya wewenang manajer dibatasi oleh hukum, agama, tradisi, dan hak asasi manusia.

Wewenang selalu bersanding dengan tanggungjawab atas tugas yang dimiliki oleh pihak yang mempunyai wewenang. Sutarto juga mengemukakan bahwa wewenang adalah hak seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>46</sup>

Menurut Supardi Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan keharusan untuk melakukan semua kewjiban/tugas yang dibebankan kepadanya sebagai

---

<sup>46</sup> Sularto. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001) h. 141

akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan/aktivitas dalam suatu perusahaan. Tanpa wewenang orang-orang dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap wewenang akan menimbulkan hak (*right*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan (*accountability*). Tegasnya tanggung jawab harus sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki.<sup>47</sup>

Selanjutnya menurut Syaeful Sagala tanggung jawab dalam manajemen akan diminta pertanggung jawabannya atau dikenal dengan istilah akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan adanya tanggung gugat yaitu:

- a. adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
- b. adanya sanksi yang disepakati atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan; dan
- c. adanya mekanisme pertanggung jawaban, laporan secara berkala, laporan pertanggung jawaban, system pengawasan, system *reward* dan *punishment*.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dimaknai bahwa pertanggung jawaban hanya diberikan kepada orang atau lembaga yang memberikan (mendelegasikan) wewenang tersebut atau *delegate* hanya bertanggung jawab

---

<sup>47</sup> Supardi, E., *Kiat Mengambil Risiko Dan Tanggung Jawab*. (Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.2004), h.54

<sup>48</sup> Syaiful Sagala. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. (Bandung: Alfabeta. 2011), h. 108

kepada *delegator*.<sup>49</sup> Tanggung jawab ini timbul karena adanya hubungan antara atasan (*delegator*) dan bawahan (*delegate*), dimana atasan mendelegasikan sebagian wewenang atau pekerjaan kepada bawahan untuk dikerjakan. *Delegate* harus benar-benar mempertanggungjawabkan wewenang yang diterimanya kepada *delegator*. Jika tidak sewaktu-waktu wewenang itu dapat ditarik kembali oleh *delegator*.

Wewenang sebenarnya mengalir dari atasan ke bawahan, jika diadakan penyerahan perintah atau tugas. Sedangkan tanggung jawab merupakan kewajiban bawahan melakukan tugas itu. Tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas. Sehingga tanggungjawab merupakan arus balik dari perintah-perintah itu. Karena sebuah organisasi/lembaga/perusahaan selalu terkait dengan organisasi/lembaga/perusahaan lainnya yang berada dalam lingkungan *system social* maka manajer puncak atau *top manager* khususnya harus bertanggung jawab kepada:

a. Pemilik organisasi/lembaga/perusahaan.

Tanggung jawab tersebut berupa a) Perusahaan harus tetap efisien; b) Hasil yang layak dan investasi; c) Fasilitas yang ada dimanfaatkan sebesar-besarnya; d) Perusahaan hendaknya dikelola berdasarkan AD dan ART serta kebijaksanaan yang digariskan; e) Mengatur rencana jangka panjang perusahaan.

---

<sup>49</sup> Nurzen. *Op.Cit.*, h 1-5

b. Karyawan organisasi/lembaga/perusahaan,

Tanggung jawab yang berkaitan dengan karyawan berupa) Pembayaran upah yang layak dan kontinen; b) Perlindungan terhadap keselamatan kerja; c) Jaminan adanya pekerjaan yang tetap; d) Kepuasan akan hasil kerja mereka.

c. Pemerintah dan konsumen.

Tanggung jawab pada bagian ini yaitu: a) mengelola perusahaan tanpa melanggar peraturan yang berlaku; b) Perusahaan hendaknya mentaati kewajiban-kewajiban; c) Perusahaan hendaknya memproduksi barang dan menjamin konsumennya; d) perusahaan bertanggung jawab terhadap mutu barang yang diproduksi; e) menjual barang dengan harga yang wajar; f) mempertahankan penyediaan barang di pasar; g) perusahaan menjaga keselamatan konsumen.

Selanjutnya menurut Supardi perlu diingat bahwa *responsibility* tidak dapat dilimpahkan (didelegasikan) kepada orang/pihak lainnya.<sup>50</sup> Hal ini penting karena untuk mencegah tumpang tindih tugas atau pekerjaan yang sedang dilakukan. Ketika hal ini terjadi dampak selanjutnya adalah timbulnya kerancuan baik dalam pekerjaan maupun laporan bawahan ke atasan. *Authority* diterima maka *responsibility*-nya juga harus diterima dengan sebaik-baiknya pula. Inilah sebabnya *top manager* yang menjadi penanggung jawab terakhir mengenai maju/mundurnya suatu perusahaan atau organisasi.

---

<sup>50</sup> Supardi, *Ibid*, h.76

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui hubungan relevan antara wewenang (*authority*) dan tanggung jawab (*Responsibility*) sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya.
- 2) Tanggung jawab tercipta karena adanya penerimaan wewenang.
- 3) Tanggung jawab harus sama dengan wewenang yang dimiliki.
- 4) Responsibility tidak dapat dilimpahkan kepada orang/pihak lain.  
Authority diterima maka responsibilitynya pun harus juga diterima.

Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab merupakan suatu konsep yang harus terintegrasi agar tujuan yang akan dicapai bisa tercapai sesuai yang diharapkan dan direncanakan. Menurut Fayol dalam Dalimunthe, R. F menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab (*Authority and Responsibility*) diperoleh melalui perintah dan untuk dapat memberi perintah haruslah dengan wewenang formil. Walaupun demikian wewenang pribadi dapat memaksa kepatuhan orang lain.<sup>51</sup>

Kesimpulan dari berbagai penjelasan di atas adalah wewenang itu berasal dari atasan ke bawahan, sedangkan tanggung jawab merupakan kewajiban bawahan melakukan tugas itu. Tanggung jawab berasal dari bawahan ke

---

<sup>51</sup> Dalimunthe, R. F., & SE, MSejarah Perkembangan Ilmu Manajemen. (Digitized By USU digital library 2003)

atasan. Agar keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab bisa terwujud harus adanya integrasi dan koordinasi yang jelas antara atasan dan bawahan.

### c. Prinsip Rantai Komando

Rantai Komando (*chain of Command*) dapat dikatakan sebagai garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga ke pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang memberikan laporan kepada siapa. Rantai Komando berkaitan dengan Otoritas dan Kesatuan Komando. Otoritas mengacu pada hak-hak inheren di dalam posisi manajerial yang memberikan perintah dan mengharapkan mereka akan mematuhi. Untuk memfasilitasi koordinasi maka tiap-tiap manajerial diberikan suatu tempat didalam rantai komando, dan masing-masing manajer diberikan tingkat otoritas agar memenuhi tanggung jawabnya .

Sedangkan, Kesatuan Komando memiliki prinsip untuk mengamankan konsep dari garis kewenangan yang tak terputus. Seseorang hanya memiliki satu alasan yang mendapat pertanggung jawaban dari dia secara langsung. Jika kesatuan komando terpecah , maka seorang pekerja harus mampu mengatasi tuntutan atau prioritas yang bertentangan dari beberapa atasan, sebagaimana sering terjadi dalam diagram struktur organisasi dengan garis terputus-putus dalam melaporkan hubungan.<sup>52</sup>

Kemudian Robbins juga menyampaikan bahwa ada enam prinsip penting yang harus diperhatikan dalam mendesain struktur organisasi salah satunya

---

<sup>52</sup> Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A, *Organizational Behavior*. 16th Edition. (Mc Graw-Hill.2014), h.54

adalah rantai komando. Unsur ini menjelaskan kepada siapa hasil aktivitas (pekerjaan) akan dilaporkan.<sup>53</sup> Hal ini juga dapat diperluas dengan pertanyaan “Kepada siapa saya harus bertanggung jawab dan kepada siapa saya harus berkonsultasi, jika terdapat masalah dalam pekerjaan?”. Ada dua unsur penting dalam menjelaskan konsep rantai komando, yaitu otoritas dan kesatuan. Otoritas merupakan hak yang melekat pada posisi manajerial seperti memberikan tugas dan mengharapkan tugas tersebut dapat dipatuhi dan dijalankan. Kesatuan perintah adalah tiap-tiap pejabat dalam organisasi hendaknya hanya dapat diperintah dan bertanggung jawab kepada seorang pejabat tertentu.

Menurut Kotter, J. P. dalam dunia yang lebih stabil, di mana manajemen merupakan aktivitas utama, pekerjaan, sebagai konsekuensinya beroperasi dalam hirarki. Maka orang-orang melihat ke bawah kepada bawahan mereka, dan ke atas kepada atasan mereka, sebagaimana terlihat pada bagan organisasi perusahaan. Dalam dunia yang senantiasa berubah, di mana diperlukan kepemimpinan tambahan, makin banyak orang di luar rantai komando seseorang mengambil kepentingan tambahan, seperti hal-hal yang tak berwujud, misalnya budaya perusahaan, namun tidak terdapat pada bagan organisasi.<sup>54</sup>

Selanjutnya menurut Yuliana, R. rantai komando juga mampu dalam mempermudah komunikasi dalam organisasi untuk pengiriman serta

---

<sup>53</sup> Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Index. 2003), h.132

<sup>54</sup> Kotter, J. P. *What Leader Really Do*. (ESENSI.2001), h.402

penerimaan berbagai pesan organisasi baik di kelompok organisasi formal maupun informal.<sup>55</sup> Secara tradisional, rantai komando dalam struktur organisasi digunakan sebagai suatu jaringan tempat mengalirnya informasi. Oleh karena itu, dalam hubungan dengan suatu jaringan, maka isi komunikasi (informasi) akan terdiri atas:

- 1) Informasi yang berisi instruksi, perintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan selalu dikomunikasikan ke bawah melalui rantai komando dari seseorang kepada orang lain yang berada di bawah hierarkinya langsung.
- 2) Informasi yang berisi laporan, pertanyaan, permohonan, selalu dikomunikasikan ke atas melalui rantai komando dari seseorang kepada atasannya langsung.

#### **d. Prinsip Kesatuan Perintah**

Sebagai salah satu prinsip pengorganisasian, kesatuan perintah (*unity of command*) menjadi sangat penting bagi suatu organisasi. Simon, H.A. mengatakan bahwa:

*Administrative efficiency is supposed to be enhanced by arranging the members of the organization in a determinate hierarchy of authority in order to preserve "unity of command."*

Artinya: "efisiensi administrasi seharusnya ditingkatkan dengan mengatur anggota organisasi dalam urutan hirarki otoritas untuk menjaga "kesatuan perintah."<sup>56</sup>

Dalam pelaksanaan kerja bisa saja terjadi adanya dua perintah sehingga menimbulkan arah yang berlawanan. Oleh karena itu, perlu alur yang jelas dari

---

<sup>55</sup> Yuliana, R. Peran Komunikasi Dalam Organisasi. (*Jurnal STIE Semarang*, 2012) 4(3), h.52-58.

<sup>56</sup> Simon, H. A. *The proverbs of administration*. (In *Democracy, bureaucracy, and the study of administration*, (Routledge ,2018),h.38-59

mana karyawan mendapatkan wewenang untuk pelaksanaan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kesalahan.

Sama dengan yang telah diungkapkan oleh Gulick, Ia menyatakan bahwa:

*“The significance of this principle in the process of co-ordination and organization must not be lost sight of. In building a structure of co-ordination, it is often tempting to set up more than one boss for a man who is doing work which has more than one relationship.”*

Artinya: “Pentingnya prinsip ini (kesatuan perintah) dalam proses koordinasi dan organisasi tidak boleh mengesampingkannya. Dalam membangun struktur koordinasi, sering tergoda untuk mengatur lebih dari satu pemimpin untuk seseorang yang melakukan pekerjaan yang memiliki lebih banyak hubungan.<sup>57</sup>

Prinsip kesatuan perintah menyatakan bahwa setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada orang atasan. Pelaporan kepada lebih dari satu atasan membuat individu mengalami kesulitan untuk mengetahui kepada siapa pertanggungjawaban diberikan dan instruksi mana yang harus diikuti. Disamping itu, bawahan dapat menghindari tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang jelek dengan alasan banyaknya tugas dari atasan lain.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesatuan perintah mempunyai peran yang vital dalam membangun kinerja yang efektif dan efisien bagi organisasi. Pemegang wewenang maupun pekerjaan yang

---

<sup>57</sup> Simon, H. A. The proverbs of administration. (In *Democracy, bureaucracy, and the study of administration*, 2018). (pp. 38-59). Routledge.

<sup>58</sup> Pratama, B. R. Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Komitmen Organisasi terhadap Prestasi Kerja Karyawan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara. (2015).

dilimpahkan akan terkordinasikan dengan baik, sehingga tidak ada kerancuan dalam perintah maupun laporan tugas yang telah diperintahkan.

e. **Prinsip Spesialisasi Kerja**

Spesialisasi kerja berfungsi untuk mendeskripsikan sampai tingkat mana tugas dalam organisasi dipecah-pecah menjadi pekerjaan yang terpisah. Pada hakekatnya dari spesialisasi kerja adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan cara memecah menjadi sejumlah langkah dengan tiap langkah diselesaikan oleh individu yang berlainan agar tujuan dan hasil segera tercapai.<sup>59</sup>

Menurut Simon, H. A. Spesialisasi hanyalah sarana bahwa orang yang berbeda melakukan hal yang berbeda hal ini disebabkan karena secara fisik tidak mungkin untuk dua orang melakukan hal yang sama di tempat yang sama sekaligus.<sup>60</sup> Kemudian Spesialisasi kerja juga bisa diartikan sebagai proses dengan berbagai macam tugas pekerjaan yang dituangkan ke dalam suatu pembagian kerja.<sup>61</sup>

Menurut Muryani dkk, para manajer umumnya memusatkan perhatian mereka pada 2 (dua) macam tingkat spesialisasi yaitu:<sup>62</sup>

- 1) Spesialisasi menurut desain pekerjaan, berupa pengalokasian tugas-tugas pekerjaan tertentu kepada individu- individu atau kelompok kelompok.

---

<sup>59</sup> Robbins. *Perilaku Organisasi. Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid 1. Edisi Ke 8, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka & Benyamin Molan, (Jakarta: PT. Prehallindo, 2002) h.132

<sup>60</sup> Simon *Opcit*,h.87

<sup>61</sup> Winardi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Grafiti, 2000) h. 389

<sup>62</sup> Muryani, S., Paramita, P. D., & Fathoni, A. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Pengawasan Kerja Dan Spesialisasi Kerja Terhadap Pemahaman Beban Kerja Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Dinas Pasar Kota Semarang)*. (Journal of Management, 2016), h. 2

- 2) Spesialisasi menurut departemensi, berupa penciptaan unit-unit kerja atau kelompok-kelompok kerja, dengan jalan menempatkan berbagai macam pekerjaan, di bawah kekuasaan manajer umum.

Spesialisasi kerja mempunyai fungsi yang besar terhadap Produktivitas yang dihasilkan. Spesialisasi pekerjaan memberikan sumber daya yang diperlukan bagi kemanusiaan untuk bidang-bidang seni, ilmu, dan pendidikan.<sup>63</sup> Adam Smith sebagai Orang pertama yang menyadari manfaat spesialisasi mulai menggambarkan spesialisasi tenaga kerja dalam sebuah pabrik, menyimpulkan bahwa satu orang dengan satu spesialisasi tugas dalam pembuatan peniti akan melipat gandakan hasil dari sebuah pekerjaan di setiap harinya. Tetapi apabila setiap orang melakukan seluruh pekerjaan itu mandiri paling banyak tiap orang hanya akan menghasilkan paling banyak 20 peniti satu hari.

Saat ini spesialisasi tidak hanya dipraktekkan dalam dunia industri, tetapi juga dalam dunia perkantoran dan pendidikan. Kerja-kerja perkantoran yang bersifat administratif saat ini dituntut untuk bekerja secara cepat dan efisien dengan hasil kerja yang mampu mendukung kecepatan pelaksanaan kerja di lapangan. Berbeda dengan pendapat di atas spesialisasi pekerjaan mempunyai kecenderungan merusak. Melcher mengemukakan teori mengapa spesialisasi itu mungkin merusak (*dys-functional*).<sup>64</sup> Teori pertama yaitu teori yang dikemukakan oleh Behling mengatakan bahwa kerja khusus (*specialized work*)

---

<sup>63</sup> Stoner, *Op cit*, h. 286

<sup>64</sup> Melcher. Arlyn J. *Struktur dan Proses Organisasi jilid J*. (Jakarta:Rineka Cipta, 1994) h.81

itu menimbulkan ketidakpuasan, karena fenomena saat ini manusia mampu memuaskan kebutuhan hingga tingkat yang paling rendah, dan ini selanjutnya membawa kebutuhan tingkat lebih tinggi ke kedudukan prioritas. Kebutuhan tingkat lebih tinggi ini dikecewakan di bawah *job Simplification* (penyederhanaan kerja) sehingga timbul ketidakpuasan terhadap organisasi.

Selanjutnya Melcher juga mengungkapkan tentang kritik spesialisasi yang disampaikan oleh aliran hubungan kemanusiaan yang menyatakan bahwa prinsip spesialisasi mengabaikan sifat-sifat pokok individu-hasratnya untuk tidak bergantung (*independence*), otonomi, kreativitas dan *self control* (mawas diri).<sup>65</sup> Para teknisi telah merancang dari pekerjaan itu semua yang memuaskan, dengan meniadakan kebutuhan akan *skil* (keterampilan), merinci metode dan alat-alat, mengharuskan para pekerja berkonsentrasi pada sebagian kecil saja dan memberikan pekerjaan yang hanya membutuhkan perhatian-permukaan (*surface attention*).

Pendapat di atas tidak sepenuhnya berlaku dalam setiap situasi kerja yang terorganisir. Dalam Melcher diungkapkan bahwa Turner dan Lawrence telah mengembangkan thesis yang menyatakan bahwa seseorang yang dibesarkan di daerah pedesaan, merasa tidak puas dengan pekerjaan yang bersifat khusus dan dilakukan berulang-ulang dan menanggapi positif perluasan pekerjaan. Sebaliknya seseorang yang bekerja dari daerah perkotaan, mereka suka dengan

---

<sup>65</sup> Melcher. Arlyn J, *Ibid.* h.98

pekerjaan yang *repetitious* (dilakukan berulang-ulang) dan tidak suka dengan variasi, otonomi, dan ciri-ciri lain yang biasa dianggap diinginkan.<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa spesialisasi dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas yang tinggi dan menjadikan pekerjaan menjadi efisien. Dalam organisasi yang besar dengan jumlah operasi kerja yang banyak dan rentang kendali yang tinggi, akan mempertinggi derajat spesialisasi yang bermacam-macam.

## f. Prinsip Pendelegasian Tugas dan Wewenang

### 1) Pendelegasian Tugas

Pendelegasian adalah konsep yang sudah sangat familiar dalam organisasi. Pendelegasian merupakan pengambilan keputusan, tugas-tugas mana yang dikerjakan dan diserahkan kepada orang lain (bawahan/karyawan/staf). Menurut Vogt, G. mengungkapkan bahwa:

*“Delegation as concept is very common. It happens everywhere and all the time: Whenever work is passed to subordinates, there is delegation of tasks. Certainly, the superior still has his own responsibility to supervise the correct and proper execution of the delegated task. But this is not sufficient. Delegation of a task also includes – often implicitly – a delegation of obligation (to do the task), responsibility (to do the task properly) and authority (to be allowed to do the task).”*

Artinya: “Pendelegasian sebagai konsep sangat umum. Itu terjadi di mana-mana dan sepanjang waktu. Setiap kali bekerja diteruskan ke bawahan, ada pendelegasian tugas. Tentu saja, atasan masih memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengawasi pelaksanaan tugas yang didelegasikan dengan benar dan tepat. Tetapi ini tidak cukup. Delegasi dari suatu tugas juga termasuk kewajiban (untuk melakukan tugas), tanggung jawab (untuk melakukan tugas dengan benar) dan wewenang (untuk diizinkan melakukan tugas).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid, h. 95-96

<sup>67</sup> Vogt, G. Delegation of tasks and rights. (2001).h.66

Berdasar atas pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pendelegasian tugas harus kepada bawahan karyawan/staf yang berkompoten dan dipercaya untuk menerima penyerahan tugas tersebut karena pendelegasian bukan semata-mata hanya penyerahan tugas, tetapi juga berikut tanggung jawab pelaksanaannya oleh mereka yang menerima tugas tersebut. Dalam hal ini termasuk otoritas pelaksanaannya, sehingga perlu penjelasan secara detail tugas-tugas yang didelegasikan kepada bawahan /karyawan/ staf. Karena hal tersebut mempengaruhi tingkat kinerja dari tugas yang didelegasikan. Menurut Hasibuan dalam Lina, D. salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas.<sup>68</sup>

Hal ini juga sejalan dengan teori Nursalam dalam Langingi, A. R., dkk. yang menyatakan bahwa prinsip pendelegasian dari atasan kepada bawahan akan memberikan otoritas kepada bawahan untuk mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan pimpinan.<sup>69</sup>

Penjelasan tentang tugas yang didelegasikan juga harus jelas. Hal ini penting dilakukan agar tugas yang dipilah sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh bawahan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Langingi, A. R.,

---

<sup>68</sup> Lina, D. Analisis Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai dengan Sistem Reward Sebagai Variabel Moderating. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 2014. Vol.14.

<sup>69</sup> Langingi, A. R., Kandou, G. D., & Umboh, J. M. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal Dengan Kinerja Perawat Pelaksana Di Instalasi Rawat Inap C RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado. (*Tumou Tou*,2015). 1(2).

yang menyatakan bahwa pendelegasian tugas sama dengan memberikan tugas dan tanggung jawab penuh sesuai dengan kompetensi masing-masing untuk dikerjakan secara maksimal.

Kemudian menurut Gaaloul, K., dkk. pemantauan delegasi tugas adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tugas yang didelegasikan selesai dengan baik. Hal ini penting agar pada saat pelaksanaan tugas tersebut bawahan tidak mengalami distorsi pekerjaan.<sup>70</sup>

Pada saat pelaksanaan pendelagasian tugas berjalan, atasan tetap wajib melakukan pemantauan dan pemotivasian pada karyawan. Karena pendelegasian tugas ini juga mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan/staf atau bawahan.<sup>71</sup>

Hal ini penting untuk menghindari deviasi pencapaian tujuan dari pendelegasian. Pada tahapan akhir dilakukan evaluasi dalam bentuk mereview sebagai bentuk dari pengendalian pendelegasian tugas. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Henderi, H., dkk, melalui pengendalian seorang manajer sebagai pemimpin dapat menggambarkan suatu perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Gaaloul, K., Zahoor, E., Charoy, F., & Godart, C. Dynamic authorisation policies for event-based task delegation. (In *International Conference on Advanced Information Systems Engineering* . 2010, June) (pp. 135-149). Springer, Berlin, Heidelberg.

<sup>71</sup> Arianty, N. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. (*Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2015), h. 14

<sup>72</sup> Henderi, H., Maimunah, M., & Aisyah, E. S. N. E-Leadership: Konsep Dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Kepemimpinan. (*CCIT Journal*, 2008). 1(2), h.165-172.

Jenis dan tugas yang didelegasikan dari pimpinan kepada bawahan / staf adalah berbeda-beda, menyesuaikan dengan tujuan dan sifat tugas, periode waktu dan kompetensi sang penerima tugas. Contohnya adalah Tugas rutin dan mudah, tugas yang membutuhkan banyak waktu, tugas yang tidak mendesak, dan bagian-bagian tugas yang tidak sulit. Tanggung jawab menjadi pertimbangan utama ketika memutuskan kepada siapa tugas diberikan memiliki porsi perhatian yang lebih besar dibanding sekedar pertimbangan kompetensi karyawan penerima pengalihan tugas. Untuk itu dalam pemilihan karyawan/staf , pimpinan harus mempertimbangkan aspek tanggung jawab, selain pengetahuan serta ketrampilan seseorang, selain itu pilihlah bawahan yang lebih mudah dan mampu menjalankan tugas setelah menjalani pelatihan atau kursus.

Ada beberapa teknik khusus dalam mendelegasikan tugas sbagaimana yang dikemukakan oleh Allen dan Meyer untuk membantu manajer melakukan delegasi secara efektif:<sup>73</sup>

a) Tetapkan tujuan.

Bawahan harus diberitahu maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka. Agar dapat bekerja selaras kearah pencapaian tujuan, koordinasi harus dilakukan, agar tugas yang dilakukan bisa berjalan dengan efisien. Selain itu agar tugas yang didelegasikan sesuai dengan tujuan maka organisasi tersebut harus

---

<sup>73</sup> Allen, N. J. & J. P. Meyer, *Commitment in The Workplace Theory Research and Application*. (Califotnia: Sage Publications, 1997), h.56

menentukan saluran komunikasi melalui berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijakan, rencana, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul.

b) Tegaskan tanggung jawab dan wewenang.

Bawahan harus diberikan informasi dengan jelas tentang apa yang harus mereka pertanggung jawabkan dan bagian dari sumberdaya-sumberdaya organisasi mana yang ditempatkan di bawah wewenangnya. Menurut Henderi, H., dkk, agar target dan prestasi yang sudah direncanakan dan ditetapkan dapat tercapai, sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan pengarahan dan melakukan pendelegasian kepada bawahannya dengan baik.<sup>74</sup>

c) Berikan motivasi kepada bawahan.

Manajer dapat memberikan dorongan kepada bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif seperti menjanjikan *reward*, menjanjikan menaikkan gaji dalam rangka peningkatan kapasitas. Menurut Sudarmo dan Sudita dalam Dewi Lina menjelaskan bahwa “*Reward* adalah hadiah, imbalan dan penghargaan atas suatu dan menguntungkan bagi perusahaan”. Dalam Ilmu perilaku ada dua jenis *reward* yang menjadi dasar dalam pemberian imbalan yaitu *reward* yang bersifat intrinsik dan *reward* ekstrinsik, kedua hal ini sangat penting di lakukan karena maksud dari memberikan *reward* pada

---

<sup>74</sup> Hendri, dkk. *Op.Cit.* h. 165-172

dasarnya adalah sebagai motivasi di masing-masing anggota organisasi, membuat kerasan pekerja yang sudah ada, dan menarik orang yang berkualitas masuk dalam organisasi.<sup>75</sup>

d) Meminta penyelesaian kerja.

Sebagai seorang Manajer perlu memberikan pedoman, bantuan dan informasi kepada bawahan, sedangkan para bawahan harus melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang telah didelegasikan.

e) Memberikan latihan.

Manajer perlu mengarahkan bawahan untuk mengembangkan pelaksanaan kerjanya. Dalam upaya memperbaiki tampilan atau pelaksanaan kerjanya dan upaya meningkatkan produktifitas organisasi bisa dilakukan suatu kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan.<sup>76</sup>

f) Mengadakan pengawasan

Sistem pengawasan yang terpercaya dibuat agar pimpinan tidak perlu menghabiskan waktunya dengan memeriksa pekerjaan bawahan terus menerus, seperti laporan mingguan. Menurut Dewi Lina, menyatakan bahwa kinerja suatu organisasi tergantung pada kerja pegawainya. Namun, pimpinan dapat berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu organisasi. Dalam hal ini,

---

<sup>75</sup> Dewi Lina, *Analisis Pengeruh Kepemimpinan Dan Budaya Orgaisasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan System Reward Sebagai Variable Moderating*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 Maret 2014

<sup>76</sup> Dewi Lina. *Ibid*.h.65

pimpinan harus mempunyai peran yang penting dalam usahanya untuk memotivasi dan mengelola pegawainya.<sup>77</sup>

## 2) Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang itu harus dapat menjamin kemampuan orang yang mendapatkan mandat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang ialah wewenang para pimpinan untuk mengambil keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi. Sedangkan prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*) dalam menjalankan tugasnya bawahan harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasannya. Sekalipun demikian atasan tidak dapat menghindarkan pertanggung jawaban atas segala kegiatan/perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Menurut Hibler, dkk dalam Rosyidi tentang pelimpahan wewenang sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa:

*“Delegation is the process by which authority is distributed throughout an organization. This concept includes the idea of assigning duties and authority to those individuals who are expected to assist in attaining the desired goals.”*

Artinya: “Pelimpahan merupakan proses pendistribusian tugas dalam suatu organisasi. Konsep ini termasuk di dalamnya adalah ide atas pekerjaan/tugas serta wewenang dari seseorang yang bertujuan untuk menentukan tujuan yang akan dicapai.”<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Dewi Lina. *Ibid.*h.67

<sup>78</sup> Ero H Rosyidi. *Pelimpahan Wewenang*. (Bandung : Alumni, 1984), h. 12

Demikian pula arti pelimpahan wewenang juga pernah dijelaskan oleh Ralph C Davis sebagai berikut:

*“Delegation of Authority is merely the phase of the process in which Authority of assigned function is released to position to be exercise by their incumbent.”*

Artinya: “Pelimpahan wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang, berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban”.<sup>79</sup>

Senada dengan pengertian pelimpahan wewenang di atas Malayu S.P. Hasibuan mengartikan pendelegasian wewenang sebagai pemberian sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator (pelimpah) kepada delegate (dilimpahkan) untuk dikerjakannya atas nama delegator.<sup>80</sup>

Menurut Louis A. Allen, pendapatnya tentang pendelegasian wewenang yaitu merupakan proses yang diikuti oleh seorang manajer dalam pembagian kerja yang dipikulkan kepadanya, sehingga ia melakukan bagian kerja itu hanya karena penempatan organisasi yang unik, dapat mengerjakan dengan efektif, sehingga ia memperoleh orang-orang lain untuk membantu pekerjaan yang tidak dapat ia kerjakan.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Ralph Currier Davis, *The fundamentals of top management*, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science (New York: Harper & Brother, 1952)

<sup>80</sup> Hasibuan. *Op. Cit.* h.71

<sup>81</sup> Hasibuan. *Op.cit.* h.72

Pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada bawahan sangat diperlukan agar organisasi dapat berfungsi secara efisien, karena tidak seorang pimpinan pun yang dapat menyelesaikan sendiri atau melakukan supervisi menyeluruh terhadap semua hal yang terjadi dalam organisasi. Pelimpahan wewenang merupakan penugasan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan. Pelimpahan wewenang ini berpengaruh pada semua keputusan tidak tersentralisasi pada pimpinan puncak. Hal yang menjadi komponen mendasar dalam proses pendelegasian wewenang adalah penetapan hasil-hasil yang diharapkan, penentuan tugas dan tanggung jawab secara jelas untuk mencapai hasil yang telah diharapkan dan pertanggungjawaban hasil-hasil yang telah dicapai. Efektifitas delegasi merupakan faktor utama yang membedakan pimpinan yang sukses dan yang tidak sukses.<sup>82</sup>

Stoner dalam Handoko mengungkapkan prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah:<sup>83</sup>

a) Prinsip Skalar.

Prinsip scalar dipahami bahwa dalam proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi paling tinggi ke tingkatan

---

<sup>82</sup> Mahiri, E. A. *Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Komitmen Organisasi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka*. (MAKSI, 2016). 3(1) h.3

<sup>83</sup> Handoko, Hani T. *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. (Yogyakarta :BPFE, 1984).

paling rendah. Garis wewenang yang jelas akan memudahkan bagi setiap anggota organisasi untuk mengetahui:

- 1) Kepada siapa dia dapat mendelegasikan
  - 2) Dari siapa dia akan menerima delegasi
  - 3) Kepada siapa dia harus memberikan pertanggungjawaban
- b) Prinsip kesatuan perintah.

Yaitu setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada orang atasan. Pelaporan kepada lebih dari satu atasan membuat individu mengalami kesulitan untuk mengetahui kepada siapa pertanggungjawaban diberikan dan instruksi mana yang harus diikuti. Disamping itu, dampak negatifnya adalah bahwa bawahan bisa menghindari tanggung jawab jika pelaksanaan tugas yang dilakukan buruk dan jelek dengan alasan banyaknya tugas dari atasan lain.

#### **4. Pendidikan**

##### **a. Definisi Pendidikan**

Pendidikan merupakan cara yang paling tepat bagi manusia untuk menjaga alam sekitar dan kaitannya dengan kehidupan manusia itu sendiri. pendidikan pada dasarnya juga bisa dipahami sebagai usaha sadar untuk membentuk sikap dan perilaku manusia.<sup>84</sup> Menurut Syah dalam Chandra, dikatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar

---

<sup>84</sup> Maisah. *Peningkatan Organizational Citizenship Behavior Dan Spiritual Quotient Melalui Pelatihan Berbasis Nilai Spiritual Guru Mts.* (Fakultas Tarbiyah Iain Jambi: Cakrawala Pendidikan, 2016) juni, th. Xxxv, No. 2.

“didik” yang mempunyai arti memelihara dan memberi latihan. Kedua hal tersebut memerlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan tentang kecerdasan pikiran.<sup>85</sup> Selanjutnya soyomukti mendefinisikan pendidikan sebagai proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Arti pendidikan itu sendiri juga menimbulkan berbagai macam pandangan, termasuk bagaimana pendidikan harus diselenggarakan dan metode seperti apa yang harus dipakai.<sup>86</sup>

Muhajir menjelaskan bahwa secara bahasa pendidikan berasal dari bahasa Yunani “*paedagogy*” yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan “*paedagogos*”. Dalam bahasa Romawi pendidikan diistilahkan sebagai *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual.<sup>87</sup> Pengertian pendidikan bisa dikatakan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan melihat definisi tersebut, sebagian orang mengartikan bahwa pendidikan adalah pengajaran

---

<sup>85</sup> Fransisca Chandra, “Peran Partisipasi Kegiatan di Alam Masa anak, Pendidikan dan Jenis Kelamin sebagai Moderasi Terhadap Perilaku Ramah Lingkungan”. (*Disertasi (S3). Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi. Unversita Gadjah Mada Yogyakarta. 2009*), h.33

<sup>86</sup> Nurani Soyomukti. *Teori-Teori Pendidikan: Dari Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern.* (Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2015), h.21-22

<sup>87</sup> Kadir, Abdul, dkk. *Dasar-Dasar Pendidikan.* (Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012), h. 59

karena pendidikan pada umumnya membutuhkan pengajaran dan setiap orang berkewajiban mendidik. Secara sempit mengajar adalah kegiatan secara formal menyampaikan materi pelajaran sehingga peserta didik menguasai materi ajar.

Jhon Dewey memberikan pandangan tentang arti pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.<sup>88</sup> Sedangkan menurut J.J. Rousseau menjelaskan bahwa pendidikan merupakan pemberian pembekalan yang ada pada masa kecil, akan tetapi pembekalan tersebut dibutuhkan pada masa dewasa.<sup>89</sup>

Menurut Zook, G. F. dalam bukunya yang berjudul *Higher Education For America Democracy* menjelaskan tentang definisi pendidikan sebagai berikut:

*“Education is an institution of civilized society, but the purposes of education are not the same in all societies, an educational system finds it’s the guiding principles and ultimate goals in the aims and philosophy of the social order in which it functions”*

Artinya: “pendidikan adalah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab, tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Sistem pendidikan suatu masyarakat (bangsa) dan tujuan-tujuan pendidikannya didasarkan atas prinsip-prinsip (nilai) cita-cita dan filsafat yang berlaku dalam suatu masyarakat (bangsa)”.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Dewey, Jhon. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h 69

<sup>89</sup> Rousseau, J.J. *Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 69

<sup>90</sup> Zook, G. F. *Higher education for American democracy: A report* (Vol. 1). (US Government Printing Office.1947). h. 11

Kemudian Menurut Richey dalam bukunya *Planing for Teaching and Introduction to Education* juga menjelaskan makna pendidikan sebagai berikut:

*“The term ‘education’ refers to the broad function of preserving and improving the life of the group through bringing new members into its shared concerns. Education is thus a far broader process than that which occurs in schools. It is an essential social activity by which communities continue to exist in complex communities this function is specialized and institutionalized in formal education, but there is always the education outside the school with which the formal process is related”*

Artinya :“Istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu bangsa (masyarakat) terutama membawa warga masyarakat yang baru (generasi muda) bagi penunaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Jadi pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang esensial yang memungkinkan masyarakat yang kompleks dan modern. Fungsi pendidikan ini mengalami proses spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal, yang tetap berhubungan dengan proses pendidikan formal di luar sekolah”.<sup>91</sup>

Manurut Noddings, N. dalam bukunya *Philosophy of Education* juga memberikan pemaparan tentang makna pendidikan, yaitu:

*“The word “education” is used, sometimes in a wider, sometimes in a narrower, sense. In the wider sense, all experience is said to be educative and life is education and education is life. In the narrower sense “education is restricted to that function of the community which consists in passing in its traditions its background and its outlook to the members of the rising generation.*

Artinya: “Perkataan pendidikan kadang-kadang dipakai dalam pengertian yang luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas pendidikan adalah semua pengalaman, dapat dikatakan juga bahwa hidup adalah pendidikan atau pendidikan adalah hidup”. “Pengertian pendidikan secara sempit adalah

---

<sup>91</sup> Richey, R.W. *Planning for teaching: An introduction to education*. (McGraw-Hill. 1968),h. 489

pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya.<sup>92</sup>

Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan diartikan sebagai Usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha tersebut dilakukan bertujuan untuk menanamkan nilai dan norma yang diwariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan.<sup>93</sup> Sedangkan Oemar Hamalik memaknai pendidikan sebagai suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.<sup>94</sup>

Menurut Redja Mudyahardjo pengertian pendidikan dapat dibagi menjadi tiga, yakni secara sempit, luas dan alternatif.

- 1) Secara sempit pendidikan didefinisikan sebagai sekolah, yakni pengajaran yang dilaksanakan atau diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang

---

<sup>92</sup> Noddings, N. *Philosophy of education*. (Routledge. 2018),h.203

<sup>93</sup> Fuad H Ihsan. *Dasar-dasar Kependidikan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) h.1

<sup>94</sup> Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.79

sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubunganhubungan dan tugas sosial mereka.

- 2) Definisi pendidikan secara luas adalah mengartikan pendidikan sebagai hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup (*long life education*). Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu.
- 3) Secara alternatif pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang.<sup>95</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani agar manusia mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa peran pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia

---

<sup>95</sup> Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),h. 11.

yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya.

**b. Proses Pendidikan.**

Sebagiman diktahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, sejak lahir hingga dewasa mengalami suatu “proses”. Menurut Y.S Rini, memaparkan bahwa proses yang panjang ini dilalui dengan pendidikan, yaitu dengan memperoleh “nilai”. Secara holistik, nilai ini diraih dalam rangka “memanusiakan” dirinya yang diperoleh dari masyarakatnya.<sup>96</sup> Masyarakat keluarga, masyarakat sekolah, masyarakat tempatnya bekerja, dan masyarakat tempat manusia itu bergaul. Kemudian ketika ada penjabaran tentang pendidikan itu dialami manusia sejak lahir hingga dewasa, berarti bisa dimaknai bahwa pendidikan itu dimulai sejak kecil hingga dewasa. Maka jika dari kecil sudah diberi pendidikan bahkan selama hidup, lingkungannya juga membentuk manusia lahir dan batinnya, maka ketika dewasa pun akan membentuk karakter. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia merupakan proses yang di dalamnya selalu bersanding dengan proses pendidikan itu sendiri.

Masih menurut Y.S Rini, menyatakan bahwa proses “memanusiakan dirinya sebagai manusia” merupakan makna yang

---

<sup>96</sup> Yuli Section Rini, Y. S.. *Pendidikan: Hakekat, Tujuan, dan Proses*. (2013), h.7

hakiki di dalam pendidikan. Keberhasilan pendidikan merupakan “cita-cita pendidikan hidup di dunia” (Dalam agama ditegaskan juga bahwa cita-cita “hidup” manusia adalah di akhirat). Akan tetapi tidak selamanya manusia menuai hasil dari proses yang diupayakan tersebut. Oleh karena itu, kadang proses itu berhasil atau kadang pun tidak. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa “keberhasilan” dari proses pendidikan secara makro tersebut merupakan tujuan.

Menurut Anwar, W. menyatakan bahwa pendidikan selayaknya dipahami sebagai suatu “proses” meningkatkan “kualitas” sekaligus “membebaskan” manusia dari segala macam penjajahan, baik penjajahan kasat mata maupun tersembunyi, tetapi berjalan sistematis. “Proses” mensyaratkan adanya pemahaman-perilaku berkelanjutan, “kualitas” mensyaratkan peningkatan intelektual, emosional, spiritual manusia, “membebaskan” mensyaratkan kemerdekaan individu kreatif. Pendidikan yang menghargai manusia pastilah akan berorientasi pada kualitas hidup dan kebebasan manusia. Pendidikan yang tidak meningkatkan kualitas dan membebaskan manusia, apalagi sampai memerosotkan martabat manusia, tentu bukan praktik pendidikan sesungguhnya.<sup>97</sup>

*Proses pendidikan* merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik dengan terarah agar tercapai

---

<sup>97</sup> Anwar, W. *Komersialisasi dan Komersialisasi dan Tanggung Jawab Pendidikan: Tanggung Jawab Pendidikan: Sekelumit Pembicaraan Sekelumit Pembicaraan*. Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania (vol. 13, no. 3, P3M STAIN), h.394-413

tujuan pendidikan.<sup>98</sup> Proses pendidikan itu sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan dilatarbelakangi oleh dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya.

Proses pendidikan juga merupakan interaksi antar berbagai unsur pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Proses pendidikan ini merupakan kegiatan sosial atau pergaulan antara pendidik dengan peserta didik dengan menggunakan isi atau materi pendidikan, metode, dan alat pendidikan tertentu yang berlangsung dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai pada tujuan yang jelas dalam dunia pendidikan maka disusunlah standar proses pendidikan.

Menurut *Badan Standar Nasional Pendidikan* disebutkan bahwa standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Standar proses meliputi perencanaan proses

---

<sup>98</sup> Setyaningsih, N. *Evaluasi Kompetensi Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Di SD Negeri Kejambon 2 Kota Tegal* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 2015)

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.<sup>99</sup>

Selain itu proses pendidikan dalam Tirtarahardja dan Sulo, juga mempunyai beberapa unsur, yaitu:<sup>100</sup>

c) Subjek yang dibimbing /peserta didik

Adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya, selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi ia ingin mengembangkan diri secara terus menerus guna memecahkan masalah yang dijumpai sepanjang hidupnya. Ciri khas yang perlu dipahami oleh pendidik :

- 1) Individu yang memilikipotensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik.
- 2) Individu yang sedang berkembang.
- 3) Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
- 4) Individu yang memilik kemampuan untuk mandiri

d) Orang yang membimbing/pendidik

Orang yang membimbing/pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sarana peserta didik.

---

<sup>99</sup> Pendidikan, B. S. N. *Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Badan Standar Nasional Pendidikan. (2007)

<sup>100</sup> Umar Tirtarahardja dan Drs. S. L. La Sulo. *Pengantar Pendidikan*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)

Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan: lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

2) Interaksi antara peserta didik dengan pendidik /interaksi edukatif

Komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanipulasikan isi, metode, serta alat-alat pendidik.

3) Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan/materi pendidikan

Materi telah diramu dalam kurikulum yang disajikan sebagai saran mencapai tujuan. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa, sedangkan muatan lokal misinya adalah mengembangkan kebhinekaan kekeyaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan.

4) Konteks yang mempengaruhi pendidikan :

- a) Alat dan metode, Diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan.
- b) Tempat peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan), Lingkungan pendidikan biasanya disebut tripusat pendidikan warga, sekolah dan masyarakat. Kearah mana bimbingan ditujukan/tujuan pendidikan.

Selain itu Notoatmojo juga yang mengungkapkan bahwa Unsur-unsur Pendidikan meliputi:<sup>101</sup>

- 1) Input, Sasaran pendidikan, yaitu : individu, kelompok, masyarakat
- 2) Pendidik, Yaitu pelaku pendidikan
- 3) Proses, Yaitu upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain
- 4) Output, Yaitu melakukan apa yang diharapkan / perilaku.

### c. **Macam-macam pendidikan**

Secara umum, terdapat 3 jenis pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Menurut Tirtarahardja dan Sulo pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku, misalnya SD,SMP,SMA, dan PT. Pendidikan nonformal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan nonformal.<sup>102</sup>

Dalam implementasinya ketiga jalur tersebut berkembang dalam keunikannya masing-masing.<sup>103</sup> Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pendidikan formal didefinisikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada

---

<sup>101</sup>Notoatmojo,S.,*Pendidikan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. (Jakarta:PT Rineka Cipta,2003),h.16

<sup>102</sup> Tirtarahardja dan Sulo. Op.Cit.

<sup>103</sup>E.Sudiapermana,. *Pendidikan Informal*,Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 2009,.h.4

umumnya pendidikan formal adalah tempat yang paling memungkinkan seseorang meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah untuk mengubah generasi muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>104</sup>

Berbeda dengan keterangan diatas Machfoeds dan Suryani menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia dapat dilaksanakan dalam dua jalur yaitu pendidikan formal dan non formal. Melalui jalur pendidikan formal seseorang dapat menempuh pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, pendidikan menengah yaitu SMA dan tinggi yaitu perguruan tinggi.<sup>105</sup> Bagi pemerintah dalam rangka pengembangan bangsa dibutuhkan pendidikan, maka jalur yang ditempuh untuk mengetahui outputnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif adalah melalui pendidikan formal.

Seiring dengan kebutuhan belajar manusia untuk belajar sepanjang hayat, sejak anak usia dini sampai dengan orang usia lanjut. Dimana seseorang atau sebuah komunitas manusia muncul kebutuhan belajar (kebutuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap), maka di situ sebaiknya kebutuhan akan pendidikan tetap mampu dilaksanakan guna untuk mengembangkan sumber daya manusia yang lebih. Maka disinilah peran pendidikan non formal.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Ahmadi dan Uhbiyati. *Op. Cit.*h.162

<sup>105</sup> Machfoedz. I, Suryani. E, Sutrisno., Santoso. S. *Pendidikan Kesehatan Bagian dari Promosi Kesehatan*. (Yogyakarta: Fitramaya, 2005) h.52

<sup>106</sup> Sudarsana, I. K. *Pemikiran tokoh pendidikan dalam buku lifelong learning: policies, practices, and programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia)*, Jurnal Penjaminan Mutu, 2016). 2(2), h.44-53.

Philip H.Coombs dalam Joesoef , berpendapat bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang diselenggarakan diluar system formal, sudah terorganisir, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar.<sup>107</sup>

Menurut Soelaman Joesoef,<sup>108</sup> pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan melalui komunikasi yang terarah di luar sekolah dan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan non formal adalah pendidikan kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Pendidikan non formal sudah ada sejak dulu dan menyatu di dalam kehidupan masyarakat lebih tua dari pada

---

<sup>107</sup> Soelaman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan non formal*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1992), h.50.

<sup>108</sup> Joesoef. *Ibid*, h 51

keberadaan pendidikan sekolah. Contoh program pendidikan non formal yang ditujukan untuk mendapatkan dan memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah minggu, berbagai latihan kejiwaan, meditasi, “manajemen kolbu”, latihan pencarian makna hidup, kelompok hoby, pendidikan kesenian, dan sebagainya. Dengan program pendidikan ini hidup manusia berusaha diisi dengan nilai-nilai keagamaan, keindahan, etika dan makna.<sup>109</sup>

Selanjutnya Abdulhak dan Suprayogi menjelaskan secara rinci tentang ciri-ciri pendidikan non formal yang berbeda dari pendidikan sekolah. Namun keduanya pendidikan tersebut saling menunjang dan melengkapi. Dengan meninjau sejarah dan banyaknya aktivitas yang dilaksanakan, pendidikan non formal memiliki cirri-ciri sebagai berikut:<sup>110</sup>

- 1) Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan.
- 2) Pendidikan non formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik.
- 3) Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengkontrol kegiatan belajarnya.

---

<sup>109</sup> Ishak Abdulhak dan Ugi Suprayogi, *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka. 2012), h.44

<sup>110</sup> Abdulhak dan Suprayogi. *Ibid*.h.25

- 4) Waktu penyelenggaraannya relative singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan.
- 5) Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta didik.
- 6) Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri.
- 7) Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator bukan mengurui. Hubungan diantara kedua pihak bersifat informal dan akrab., peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur.
- 8) Penggunaan sumber-sumber local. Mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber local digunakan seoptimal mungkin.

Menurut Sanapiah menyatakan bahwa jenis dan isi pendidikan non formal pada dasarnya bergantung pada kebutuhan pendidikan yaitu 1) Jenis pendidikan non formal berdasarkan fungsinya 2) Isi program pendidikan non formal yang berkaitan dengan peningkatan mutu kehidupan.<sup>111</sup>

1) Jenis pendidikan non formal berdasarkan fungsinya adalah:

- a) Pendidikan Keaksaraan

---

<sup>111</sup> Sanapiah Faisal. *Pendidikan non formal Di dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional*. (Surabaya: Usaha Offset Printing. 1981), h.91

Jenis program pendidikan keaksaraan, ia berhubungan dengan populasi sasaran yang belum dapat membaca-menulis. Target pendidikannya dari program pendidikan keaksaraan ini adalah terbebasnya populasi sasaran dari buta baca, buta tulis, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan umum.

b) Pendidikan Vokasional

Jenis program pendidikan vokasioanal berhubungan dengan populasi sasaran yang mempunyai hambatan di dalam pengetahuan dan keterampilannya guna kepentingan bekerja atau mencari nafkah. Target pendidikannya dari program pendidikan vokasional ini adalah terbebasnya populasi sasaran dari etidaktahuan atau kurang kemampuannya didalam pekerjaan-pekerjaan yang sedang atau akan dimasukkannya.

c) Pendidikan Kader

Jenis program pendidikan kader berhubungan dengan populasi sasaran yang sedang atau bakal memangku jabatan kepemimpinan atau pengelola dari suatu bidang usaha di masyarakat, baik bidang usaha bidang social-ekonomi maupun social-budaya. Jenis pendidikan ini diharapkan hadir tokoh atau kader pemimpin dan pengelola dari kelompok-kelompok usaha yang tersebar di masyarakat.

d) Pendidikan Umum dan Penyuluhan

Jenis program pendidikan ini berhubungan dengan berbagai variable populasi sasaran, target pendidikannya terbatas pada pemahaman dan menjadi lebih sadar terhadap sesuatu hal. Lingkup geraknya bisa sangat luas dari soal keagamaan, kenegaraan, kesehatan, lingkungan hukum dan lainnya.

e) Pendidikan Penyegaran Jiwa-raga

Jenis program pendidikannya ini berkaitan dengan pengisian waktu luang, pengembangan minat atau bakat serta hobi.

2) Isi program pendidikan non formal yang berkaitan dengan peningkatan mutu kehidupan seperti:

- a) Pengembangan nilai-nilai etis, religi, estetis, social, dan budaya.
- b) Pengembangan wawasan dan tata cara berfikir.
- c) Peningkatan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan.
- d) Peningkatan dan pengembangan pengetahuan di dalam arti luas ( social, ekonomi, politik, ilmu-ilmukealaman, bahasa, sejarah, dan sebagainya)
- e) Apresiasi seni-budaya ( sastra, teater, lukis, tari, pahat dan lain sebagainya)

Selain komponen sistem pendidikan non formal , menurut Paul Lengrand pendidikan informal yang lebih fleksibel dan inovatif harus memperkaya pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dan tidak akan

dilakukan sekolah.<sup>112</sup> Dalam banyak kajian akademik memang indikator pendidikan informal selalu terkait dengan adanya kemandirian belajar dan tidak adanya pihak tertentu yang secara “sengaja” membangun interkasi dan melakukan intervensi.<sup>113</sup>

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal dilakukan di sekolah, pendidikan non formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal utamanya dilaksanakan di keluarga.

Menurut Tarakiawan dalam Julaeha & Leatemia, pendidikan yang bisa diterapkan dalam lingkungan keluarga, yaitu:<sup>114</sup> 1) pendidikan iman, 2) pendidikan moral, 3) pendidikan fisik, 4) pendidikan intelektual, 5) pendidikan psikis, 6) pendidikan sosial, dan 7) pendidikan seksual. Kemudian Abdul Halim dalam Mustafa & Salim menjelaskan bahwa pendidikan anak dalam lingkungan keluarga bertujuan untuk menyelamatkan fitrah Islamiah anak, mengembangkan potensi pikir anak, mengembangkan potensi rasa anak,

---

<sup>112</sup> Lengrand, P. *Pendidikan Sepanjang Hayat* Terjemahan Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan. (Jakarta: Gunung Agung, 1984),h.23

<sup>113</sup> Sudiapermana, Ependidikan Informal Reposisi, Pengakuan dan Penghargaan. *Fakultas Ilmu Pendidikan-Universitas Pendidikan Indonesia*. 2009), h.121

<sup>114</sup> Julaeha, S. E., & Leatemia, L. S. D. Informal Education Of Cattle Breeder Families At Pojok Girang Kampong Cikahuripan Village. (*Empowerment*, 2019). 8(1),h. 56-64.

mengembangkan potensi karsa anak, mengembangkan potensi kerja anak, dan mengembangkan potensi sehat anak.<sup>115</sup>

Julaeha & Leatemia mengungkapkan pendidikan dalam lingkungan keluarga sebagai berikut:

*“Family is first line which is do the education process, because at that time children have not been able to carry out the socialization process with the community, so the family environment is the educator, So much and the potential for informal education and learning carried out in the family and community environment means to change lives (especially the development of children). Children are individuals who still experience development both physically and intellectually. Children become one of the important assets for families, communities, nations and countries. Because children are blessed with extraordinary abilities in themselves. The development of the child's potential or ability is one of the tasks of education.”*

Artinya: "Keluarga adalah lini pertama yang melakukan proses pendidikan, karena pada saat itu anak-anak belum dapat melakukan proses sosialisasi dengan masyarakat, sehingga lingkungan keluarga adalah pendidik. Begitu banyak dan potensi untuk pendidikan dan pembelajaran informal dilakukan di keluarga dan lingkungan masyarakat berarti mengubah kehidupan (terutama perkembangan anak-anak). Anak-anak adalah individu yang masih mengalami perkembangan baik secara fisik maupun intelektual. Anak-anak menjadi salah satu aset penting bagi keluarga, komunitas, bangsa dan negara. Karena anak-anak diberkati dengan kemampuan luar biasa dalam diri mereka sendiri. Itu pengembangan potensi atau kemampuan anak adalah salah satu tugas pendidikan."<sup>116</sup>

Adapun mengenai metode-metode dalam pendidikan keluarga yang banyak berpengaruh terhadap anak, menurut Abdullah Nashih Ulwan, terdiri dari:<sup>117</sup> 1) pendidikan dengan keteladanan, 2) pendidikan

---

<sup>115</sup> Mustafa, Z., & Salim, H. (2012). *Factors affecting students' interest in learning Islamic education*. Journal of Education and Practice, 3(13), h.81-86.

<sup>116</sup> Julaeha & Leatemia, *Op.Cit.* 56-64

<sup>117</sup> Abdullah Nashih Ulwan. *Kaidah-kaidah Dasar Pendidikan Anak Menurut Islam*. (Bandung: Remaja Rosda Karya Pustaka, 1992),h.67

dengan adat kebiasaan, 3) pendidikan dengan nasihat, 4) pendidikan dengan pengawasan, dan 5) pendidikan dengan hukuman (sanksi).

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, nonformal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumberdaya manusia sangat bergantung kepada sejauh mana ketiga sub-sistem tersebut berperanan.

#### **d. Unsur-unsur dalam Pendidikan**

Pendidikan mempunyai unsur-unsur yang saling terkait antar satu sama lain. Unsur-unsur tersebut antara lain: 1) peserta didik; 2) pendidik; 3) tujuan pendidikan; 4) interaksi edukatif; 5) Materi pendidikan; 6) alat dan metode; dan 7) lingkungan pendidikan.<sup>118</sup> Pada bagian ini akan diuraikan tentang unsur-unsur yang ada dalam pendidikan tersebut. Proses pendidikan melibatkan banyak hal yaitu:

##### **a. Peserta Didik**

Dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang menjadi fokus perhatian adalah peserta didiknya, baik itu di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Menengah, ataupun di Perguruan Tinggi dan pendidikan untuk orang dewasa lainnya.<sup>119</sup> Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu

---

<sup>118</sup> Teguh Triwiyanto. *Pengantar Pendidikan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014),h.24

<sup>119</sup> M Sumantri. *Perkembangan peserta didik*. (2014),h.1-52

(Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Jadi bisa diartikan bahwa peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu, yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan.<sup>120</sup>

Peserta didik itu juga manusia, maka dapat dikatakan bahwa manusia itu dalam mengembangkan potensinya juga membutuhkan pendidikan. Akan tetapi peserta didik sebagai individu adalah orang yang tidak bergantung pada orang lain dalam arti bebas menentukan sendiri dan tidak dipaksa dari luar, maka daripada itu dalam dunia pendidikan siswa harus diakui kehadirannya sebagai pribadi yang unik dan individual.<sup>121</sup> Setiap peserta didik memiliki karakteristik individual yang khas dan terus berkembang meliputi perkembangan emosional, moral, intelektual dan sosial. Perkembangan ini berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik sebagai subjek pendidikan.<sup>122</sup>

Sebagai subjek pendidikan menurut Tirtarahardja & La Sulo peserta didik memiliki pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya.<sup>123</sup> Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan

---

<sup>120</sup> Bahrudin. *Manajemen Peserta Didik*. ( Jakarta: PT. Indeks, 2014), h.20

<sup>121</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h.39

<sup>122</sup> Sunarto dan Agung Hartono. *Perkembangan Peserta Didik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.181

<sup>123</sup> Tirtarahardja dan Sulo. *Op.Cit.* h.52

otonomi, ia ingin mengembangkan diri (mendidik diri) secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah:

- 1) Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik.
- 2) Individu yang sedang berkembang.
- 3) Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
- 4) Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri

#### **b. Pendidik**

Menurut Tirtarahardja dan Sulo yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat.<sup>124</sup>

Ki Hadjar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidik harus memiliki konsep 3 kesatuan sikap yang utuh, yakni *ing ngarsa sung tuladha*, *ing madya mangun karsa*, dan *tut wuri handayani*. Pengertiannya, bahwa sebagai pendidik harus mampu menjadi

---

<sup>124</sup> Tirtarahardja dan Sulo. *Ibid*,h.53

tauladan bagi peserta didiknya, pendidik juga mampu menjaga keseimbangan, juga dapat mendorong, dan memberikan motivasi bagi peserta didiknya. Trilogi pendidikan ini diserap sebagai konsep “*kepemimpinan Pancasila*”.<sup>125</sup>

Dalam bukunya Zahara Idris dan Lisma Jamal menyatakan bahwa syarat utama pendidik adalah mampu sebagai sosok tauladan. Konsep pendidik yang sekaligus pemimpin seperti yang diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara di atas, yakni *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* yang semaksimal mungkin harus dipenuhi komponen pendidik. Jika konsep ini dipenuhi, maka dalam diri pendidik tersebut akan memancarkan “aura” yang menyebabkan wibawa pada dirinya. Di samping itu pendidik sebagai sosok yang *digugu lan ditiru* (diikuti dan ditiru) akan menjadi bukti kebenarannya. Tidak kalah pentingnya dalam usaha memperoleh keberhasilan ini adalah sikap pendidik yang ikhlas.

Kemudian pendidik menurut Al-Ghazali dalam Ridla, menyatakan bahwa pendidik merupakan orang yang disertai tugas untuk menghilangkan akhlak yang buruk dari dalam diri anak didik dengan tarbiyah dan menggantinya dengan akhlak yang baik, tidak tergiur oleh dunia, harta maupun jabatan, agar nantinya para pencari

---

<sup>125</sup> Dewantara, Ki Hadjar. *Karya Ki Hadjar*. (Yogyakarta: Taman Siswa, 1961), h.9-10

jalan sejati itu dalam hal ini ialah murid, dapat dengan mudah menuju jalan ke akhirat.<sup>126</sup>

Dalam karyanya *Ihya' 'Ulumuddin*, Al-Ghazali telah menguraikan tugas tugas yang harus dimiliki oleh seorang guru maupun murid agar terciptanya suasana pembelajaran yang efektif dan harmonis layaknya sebuah keluarga, sehingga nantinya buah dari hasil ilmu yang diajarkan oleh para pendidik tersebut yang berupa amal dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh peserta didik.<sup>127</sup> Adapun etika yang harus dimiliki seorang guru menurut al-Ghazali antara lain:

- 1) Hendaknya para pendidik itu memperlakukan murid-muridnya seperti memperlakukan anaknya sendiri.
- 2) Hendaknya guru meneladani Rasulullah Saw. yang membawa peraturan agama, jadi hendaknya ia tidak meminta upah dan balasan duniawi dalam mengajarkan ilmunya.
- 3) Janganlah guru itu enggan untuk menasehati dan menegur muridnya dari akhlak yang buruk dengan sindiran dan tidak dengan terang-terangan.
- 4) Tidak merendahkan ilmu pengetahuan yang belum diketahuinya di hadapan para muridnya.

---

<sup>126</sup> Muhammad Jawad Ridla, *Tiga Aliran Utama Pendidikan Islam*, terj. Mahmud Arif (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), h.123

<sup>127</sup> H.Anhar.*Interaksi Edukatif Menurut Pemikiran Al-Ghazali*, (Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2013). 13(1), h28-41.

- 5) Hendaknya guru dapat mengetahui ukuran pemahaman/kemampuan (potensi) anak didiknya.
- 6) Hendaknya seorang guru mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, agar ucapannya tidak berbeda dengan perbuatannya.

Peranan pendidik dalam melakukan tugas profesionalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidik sebagai pengajar.

Menurut Mulyasa<sup>128</sup> pendidik yang kedudukannya sebagai pengajar harus menekankan tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran, karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang utama dan pertama, untuk itu pendidik harus membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari.

- 2) Pendidik sebagai pembimbing.

Pendidik sebagai pembimbing memberi tekanan pada tugas memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian

---

<sup>128</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h.38.

ilmu pengetahuan, tetapi juga menyangkut pengembangan, kepribadian dan pembentukan nilai-nilai pada siswa.<sup>129</sup>

3) Pendidik sebagai mediator.

Djamarah mengungkapkan bahwa pendidik sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran, karena media pembelajaran merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan dalam proses belajar mengajar, baik yang berupa nara sumber, buku teks, majalah maupun surat kabar.<sup>130</sup>

4) Pendidik sebagai evaluator.

Pada dasarnya setiap jenis pendidikan atau bentuk-bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan orang selalu mengadakan evaluasi, guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegunaan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan. Penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketetapan ataupun keefektifan metode mengajar dengan penilaian, pendidik dapat mengklasifikasikan apakah seorang siswa termasuk kelompok siswa yang pandai, sedang, kurang atau cukup baik di kelasnya jika dibandingkan dengan teman-temannya.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Mulyasa. *Ibid.* H.39

<sup>130</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.11.

<sup>131</sup> Djamarah. *Ibid.*, h.47

5) Pendidik sebagai motivator.

Sebagai motivator pendidik diharapkan berperan sebagai pendorong siswa dalam belajar, dorongan tersebut diberikan jika siswa kurang bergairah atau kurang aktif dalam belajar, sebagai motivator pendidik harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar baik secara individu atau secara kelompok.<sup>132</sup>

Selain itu Sadirman<sup>133</sup> mengungkapkan bahwa ada syarat-syarat tertentu bagi pendidik supaya bisa melaksanakan peran dan melaksanakan tugas serta bertanggung jawabnya dengan baik, diantaranya yaitu:

9) Persyaratan administratif.

Dalam hal ini meliputi, soal kewarganegaraan (warga negara Indonesia), umur sekurang-kurangnya 18 tahun, berkelakuan baik dan mengajukan permohonan.

10) Persyaratan teknis.

Persyaratan ini adalah bersifat formal yakni harus berijazah pendidikan pendidik, menguasai teknis dan cara mengajar, trampil mendesain program pengajaran serta memiliki motifasi dan cita-cita memajukan pendidikan.

2) Persyaratan psikis.

---

<sup>132</sup> A.M. Sadirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar; Pedoman Bagi Guru dan Calon Guru*. (Bandung: Rajawali, 1998). hal 142

<sup>133</sup> Sadirman, *Ibid*, h.124

Persyaratan ini meliputi sehat rohani, dewasa dalam berfikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah dan sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan berani bertanggung jawab, berani berkorban dan memiliki jiwa pengabdian.

### 3) Persyaratan fisik.

Persyaratan ini meliputi, berbadan sehat tidak memiki cacat tubuh yang mungkin mengganggu pekerjaanya, tidak memiliki gejala-gejala penyakit yang menular.

### e. Tujuan pendidikan

Tujuan itu menunjukkan ketentuan arah daripada suatu usaha, sedangkan arah itu menunjukkan jalan yang harus dilalui. Jalan yang harus dilalui itu dimulai dari titik start yaitu pandangan hidup dan berakhir pada titik finish yaitu tercapainya kepribadian hidup yang dicita-citakan. Ketentuan arah tujuan hidup suatu bangsa akan tertuang pada UUD bangsa itu sendiri dan adapun jalan yang harus dilalui yaitu cara-cara melaksanakan aktivitas.<sup>134</sup>

Pendidikan sebagai salah satu cara untuk menentukan arah tujuan hidup secara spesifik juga mempunyai tujuan yang jelas dan terukur dan berproses selama manusia hidup. Sehingga tujuan pendidikan ditanamkan sejak manusia masih dalam kandungan, lahir, hingga dewasa yang sesuai dengan perkembangan dirinya.

---

<sup>134</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2007), h.105

Ketika masih kecil pun pendidikan sudah dituangkan dalam UU 20 Sisdiknas 2003, yaitu disebutkan bahwa pada pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.<sup>135</sup>

Tujuan umum pendidikan menurut adalah persiapan atas tugas pelayanan publik. Secara psikologi, tujuan pendidikan adalah membentuk karakter yang berwujud dalam kesatuan esensial si subyek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Para pakar pendidikan sepakat untuk mengatakan “perluanya keseimbangan antara dimensi kognitif dan afektif dalam proses pendidikan”. Artinya untuk membentuk manusia seutuhnya tidak cukup hanya dengan mengembangkan kecerdasan berpikir atau IQ anak didik melalui segudang ilmu pengetahuan, melainkan juga harus dibarengi dengan pengembangan perilaku dan kesadaran moral. Karena dengan hanya kombinasi seperti itulah peserta didik akan mampu menghargai nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan orang lain.<sup>136</sup> Tujuan pendidikan disebut juga dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 3 adalah sebagai berikut “pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

---

<sup>135</sup> Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>136</sup> Muhammad Ali, dkk. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. (Bandung: Pedagogiana. Press, 2007).h.137

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Selanjutnya menurut Tamalene tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi yaitu, memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan suatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.<sup>137</sup>

Menurut Langeveld Dalam Firmantyo & Alsa Menyebutkan ada 6 tujuan pendidikan:<sup>138</sup>

- 1) Tujuan umum. total atau akhir: tujuan yang paling akhir dicapai merupakan keseluruhan/kebulatan tujuan yang ingin dicapai. Seperti: membentuk mausia Indonesia seu -tulinya dsb.
- 2) Tujuan khusus: pengkhususan dari tujuan umum, yaitu pengkhususan berdasarkan usia, jenis kelamin, intelegensi (super normal, normal dan di bawa normal), bakat atau minat dsb.
- 3) Tujuan tak lengkap: hanya meliputi sebagian kehidupan manusia. Misalnya: segi psikologis, sosiologis dsb.
- 4) Tujuan sementara: hanya berlaku sementara, kalau sudah tercapai tujuan yang diinginkan, maka tujuan sementara itu lalu ditinggalkan. Misalya: tujuan mengirim anak ke pesantren pondok agar anak

---

<sup>137</sup> Tamalene. *Bahan Ajar Pengantar Pendidikan*, (FKIP-Chemistry, Unkhair. Ternate, 2011).

<sup>138</sup> Firmantyo, T., & Alsa, A, *Integritas Akademik dan Kecemasan Akademik dalam Menghadapi Ujian Nasional pada Siswa. Psikohumaniora*, Jurnal Penelitian Psikologi, 2017, 1(1), h.1-11.

menjadi tenang pikirannya. Kalau sudah tenang, maka ia dipanggil kembali pulang ke rumah.

- 5) Tujuan intemedier: tujuan perantara untuk mencapai tujuan yang pokok, misalnya: anak dimasukkan dalam Pusat Latihan Kerja, agar anak pada saatnya dapat bekerja sendiri secara mandiri.
- 6) Tujuan insidental: tujuan yang ingin dicapai pada saat-saat tertentu. Misalnya memberitahu cara-cara makan yang sopan pada saat makan bersama

Di samping itu Depdiknas mengungkapkan 6 fungsi pendidikan yaitu:<sup>139</sup>

- 1) Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin kepada anak.
- 2) Mengenalkan anak pada dunia sekitarnya.
- 3) Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik.
- 4) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi.
- 5) Mengembang ketrampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak.
- 6) Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar.

Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen penting lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditujukan untuk pencapaian

---

<sup>139</sup> Depdiknas, D. T. K., & Dikdasmen, D. (2004). Standar Kompetensi Guru. *Jakarta: Depdiknas.*

tujuan tersebut. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan tersebut dianggap menyimpang, tidak fungsional, bahkan salah, sehingga perlu dicegah terjadinya. Di sini terlihat bahwa tujuan pendidikan itu bersifat normative, yaitu mengandung unsur norma yang bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik.

Dari beberapa uraian di atas inilah, maka pendidikan yang menanamkan nilai-nilai positif akan tepat dimulai ketika anak usia dini. Dengan demikian pendidikan bagi peserta didik yang masih kecil merupakan landasan yang tepat sebelum masuk pada pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan awal yang sesuai dengan tujuan untuk mengembangkan sosialisasi anak, menumbuhkan kemampuan sesuai dengan perkembangannya, mengenalkan lingkungan kepada anak, serta menanamkan disiplin, karena secara tidak langsung dapat menanamkan atau mentransfer nilai-nilai moral dan nilai sosial kepada anak. Jadi dari uraian konsep pendidikan seperti tersebut dalam pendahuluan, dapat dipahami makna dan kepentingan pendidikan secara hakiki bagi manusia.

### **c. Materi Pendidikan**

Dalam persekolahan materi pendidikan dikenal dengan istilah materi pembelajaran. Menurut Zahara mengartikan materi pembelajaran sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik

dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta didik.<sup>140</sup>

Dalam pendidikan khususnya proses pembelajaran salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan keseluruhan adalah kemampuan dan keberhasilan seorang guru merancang serta menyampaikan materi pembelajaran. Nasar mendefinisikan materi pembelajaran sebagai segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran agar dapat menjadi kompeten.<sup>141</sup>

Definisi lain dari Suryosubroto<sup>142</sup>, materi pembelajaran adalah gabungan antara pengetahuan (fakta, informasi yang terperinci), keterampilan (langkah, prosedur, keadaan dan syarat-syarat) dan faktor sikap. Sedangkan Rusman<sup>143</sup> berpendapat bahwa materi pembelajaran atau isi pokok bahasan (*Subject Content*) adalah apa-apa yang harus

---

<sup>140</sup> Zahara Idris, , *Pengantar Pendidikan I*, (Jakarta : Grasindo,1995),h.87

<sup>141</sup> Nasar. *Merancang Pembelajaran Aktif dan Kontekstual berdasarkan "SISKO"*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006) h.19.

<sup>142</sup> Suryosubroto.. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002) h. 32

<sup>143</sup> Rusman. *Model-model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru Edisi Kedua)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h.17.

dipelajari oleh siswa. Isi pokok bahasan atau materi harus spesifik dan erat hubungannya dengan tujuan (*learning objectives*).

Materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang merupakan isi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan raga serta berguna bagi modal bagi kehidupan di masa depan.<sup>144</sup> Pada umumnya sebuah materi pembelajaran ini telah di bagi menjadi tiga jenis yakni :

- a) Alat, informasi dan juga sebuah teks atau program yang di perlukan oleh para guru untuk melakukan sebuah perencanaan belajar.
- b) Sebuah alat yang dipergunakan oleh guru untuk menerapkan sebuah pembelajaran yang baik dan mudah di mengerti para siswanya.
- c) Yang terakhir adalah sebuah perangkat substansi dari pembelajaran yang dapat di susun dengan sistematis di dalam proses pembelajaran.

Materi pendidikan merupakan suatu materi yang segar dan update selain itu juga harus mudah dipahami dan interaktif.<sup>145</sup> Jadi terdapat timbal balik antara pendidik dan peserta dalam melakukan pelajaran. Sehingga perlu adanya pengklasifikasian jenis-jenis materi pendidikan yang mampu menjadi panduan dalam pembelajaran. Merrill dalam Wina Sanjaya membedakan isi jenis materi pendidikan sebagai berikut.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> Hadisusanto Dirto, dkk.. *Pengantar pendidikan*, (Jogjakarta: UNY. 1995),h.102

<sup>145</sup> Endang Hangestiningih, Heri Maria Zulfiati, Arif Bintoro Johan . DIKTAT PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN. (Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. 2015)

<sup>146</sup> Wina Sanjaya. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. (Jakarta: Kencana, 2010),h.45

## 1. Fakta

Fakta merupakan abstraksi dari kenyataan yang diamati, yang sikapnya terbatas dan dapat diuji kebenarannya secara empiris.<sup>147</sup> Menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English<sup>148</sup>, yang dimaksud fakta adalah:

- a) Sesuatu yang mengacu pada situasi tertentu atau khusus.
- b) Kualitas atau sifat yang aktual (nyata) atau dibuat atas dasar fakta-fakta.
- c) Sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi, terutama yang dapat dibuktikan oleh bukti yang benar.
- d) Hal yang terjadi dapat dibuktikan oleh hal-hal yang benar, bukan oleh berbagai hal yang telah ditemukan.
- e) Sesuatu yang mengandung sesuatu yang memiliki kenyataan objektif, dalam arti luas adalah sesuatu yang ditampilkan dengan benar atau salah karena memiliki realitas objektif.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fakta adalah segala hal yang bewujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya.

## 2. Konsep

---

<sup>147</sup> Wardi *Bachtiar*, Metodologi Penelitian Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997) h.113-114

<sup>148</sup> Hornby, A. S., , *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 2000), h. 449-450

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.<sup>149</sup> Sedangkan menurut Horton & Hunt<sup>150</sup> konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti /isi dan sebagainya.

### 3. Prinsip

Prinsip adalah pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama (ahmad Jauhar Tahmid).<sup>151</sup> Bilfaqih dan Qomarudin prinsip berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antarkonsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat.

### 4. Prosedur

Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.<sup>152</sup> Menurut Mulyadi yang dimaksud dengan prosedur adalah “suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa

---

<sup>149</sup> Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Edisi. Revisi, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995) h.34

<sup>150</sup> Paul B Horton, Chester L Hunt. *Sosiologi*. Jilid I. Diterjemahkan oleh Aminudin Ram & Tita Sobari. (Jakarta: Erlangga, 1987) h.119

<sup>151</sup> Bilfaqih, Y., & Qomarudin, M. N. *Esensi Penyusunan Materi Pembelajaran Daring*. (Deepublish. 2015),h.98

<sup>152</sup> Ida Nuraida. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. (Yogyakarta: Kanisius. 2008) hal 35

orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contoh: praktik penelitian sosial.<sup>153</sup>

#### 5. Sikap atau Nilai

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir dan merasa dalam objek, ide, situasi atau nilai misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, dan bekerja.

Selain itu materi pendidikan juga harus dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Pengembangan Materi pendidikan harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip dalam pengembangannya. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah kesesuaian (relevansi), keajegan (konsistensi), dan kecukupan (adequacy).

##### 1. Relevansi atau kesesuaian.

Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa

---

<sup>153</sup> Mulyadi. *Akuntansi manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. edisi 3 (Universitas Gadjah Mada, 2001), h.5

menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain.

2. Konsistensi atau keajegan.

Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada dua macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi dua macam.

3. *Adequacy* atau kecukupan.

Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum (pencapaian keseluruhan SK dan KD).

**d. Alat dan metode**

1) Alat-alat

Alat pendidikan adalah hal yang memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, selain itu alat pendidikan juga bisa diwujudkan sebagai perbuatan atau situasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan dalam menggunakan alat pendidikan, sudah ditentukan tujuan yang akan dicapai, dan tujuan tertentu

untuk mempengaruhi anak didik. Perlu diketahui bahwa alat pendidikan ialah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.<sup>154</sup> Adapun pembagian alat pendidikan menurut Drs. Suwarno dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :<sup>155</sup>

a) Alat Pendidikan Positif dan yang Negatif.

1) Positif yaitu ditunjukkan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik, misalnya : contoh yang baik pembiasaan, perintah pujian, ganjaran.

2) Negatif, jika tujuannya menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang buruk, misalnya larangan, celaan, peringatan, ancaman, hukuman.

3) Alat Pendidikan Preventif dan Korektif

4) Preventif, jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, misalnya contoh : pembiasaan perintah, pujian, ganjaran.

5) Korektif, jika maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk, misalnya : celaan, ancaman, hukuman.

b) Alat Pendidikan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan.

1) Yang menyenangkan yaitu menimbulkan perasaan senang pada anak-anak, misalnya ganjaran, pujian.

---

<sup>154</sup> Rosdiana A. Bakar, M.A., 2009. *Pendidikan Suatu Pengantar*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis), h.66.

<sup>155</sup> Suwarno, W. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h.34

- 2) Yang tidak menyenangkan, maksudnya yang menimbulkan perasaan tidak senang pada anak-anak, misalnya hukuman dan celaan

Ekosusilo membagi alat pendidikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:<sup>156</sup>

- 1) Alat Pendidikan yang bersifat materiil, yaitu alat-alat pengajaran yang berupa benda-benda yang nyata.
- 2) Alat pendidikan yang bersifat non materiil yaitu alat-alat pendidikan yang tidak bersifat kebendaan melainkan segala macam keadaan atau kondisi, tindakan dan perbuatan yang diadakan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam melaksanakan pendidikan.

Menurut Anshari menyatakan bahwa alat-alat pendidikan adalah segala sesuatu yang membantu terlaksananya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan baik berupa benda atau bukan benda. Alat pendidikan dapat dikategorikan kedalam 2 kelompok, yaitu :<sup>157</sup>

a) Alat Sebagai Perlengkapan

Alat sebagai perlengkapan ialah alat yang berwujud benda-benda yang nyata atau kongkret yang dipentingkan dalam pelaksanaan pendidikan. Perlengkapan ini antara lain :

1) Buku Teks

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 menjelaskan bahwa buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam

---

<sup>156</sup> Ekosusilo, Madiyo, *Dasar-Dasar Pendidikan*. (Semarang: Efhar Publishing, 1985), h.43.

<sup>157</sup> M. Hafi Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982), h.55

rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.

Kemudian Tarigan dan Tarigan memaparkan buku teks sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan *instruksional*, yang diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang sesuatu program pengajaran.<sup>158</sup>

*Textbook* mempunyai padanan kata buku pelajaran.<sup>159</sup> Selanjutnya *textbook* menurut Crowther dijelaskan sebagai:<sup>160</sup> “*a book giving instruction in a subject used especially in schools*” yaitu buku teks adalah buku yang memberikan petunjuk dalam sebuah pelajaran khususnya di sekolah.<sup>161</sup>

Selanjutnya Altbach, dkk, telah pula menjabarkan tentang buku teks adalah sebagai berikut:

---

<sup>158</sup> Tangan, H. G. dan Tangan, D. Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1986), h.13

<sup>159</sup> Echols, Jhon M dan Shadily hasan, *Kamus Inggris-Indonesia*. Cetakan ke-29. (Jakarta, PT Gramedia, 2007), h.584.

<sup>160</sup> Crowther, J. R.. *ELISA: Theory And Practice* (Vol. 42). (Springer Science & Business Media, 1995), h.1234

<sup>161</sup> Crowther, J. R.. *ELISA: theory and practice* (Vol. 42). (Springer Science & Business Media, 1995), h.1234

*“Textbooks are a central part of any educational system. They help to define the curriculum and can either significantly help or hinder the teacher”*

Artinya: “buku teks merupakan sebuah bagian utama dari beberapa sistem pendidikan yang membantu untuk memaparkan kurikulum pendidikan dan dapat menjadi bantuan yang jelas bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran”<sup>162</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa buku teks merupakan sekumpulan tulisan yang dibuat secara sistematis oleh pakar dalam bidang masing-masing berisi materi pelajaran tertentu dan telah memenuhi indikator sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan sebelumnya. Buku teks merupakan alat sebagai penjelas bagi pendidik, karena itu harus benar-benar buku yang terpilih sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan sebagai pegangan serta alat bantu siswa dalam memahami materi belajar dalam pembelajaran.

Menurut Wiratno jenis-jenis buku teks yang digunakan di sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, baik untuk murid maupun guru, yang digunakan untuk proses pembelajaran adalah:<sup>163</sup>

- a) buku teks utama, yakni yang berisi pelajaran suatu bidang tertentu yang digunakan sebagai pokok bagi murid atau guru,
- b) buku teks pelengkap, yakni yang sifatnya membantu, memperkaya, atau merupakan tambahan dari buku teks utama baik yang dipakai murid maupun guru.

---

<sup>162</sup> Altbach, P. G., Kelly, G. P., Petrie, H. G., & Weis, L. (Eds.). *Textbooks in American society: Politics, policy, and pedagogy*. (SUNY Press, 1991), h.1

<sup>163</sup> Wiratno, T. *Mencerna Buku Teks Bahasa Inggris Melalui Pemahaman Gramatika*. (Pustaka Pelajar, 2002), h.40

Sedangkan menurut Tarigan dan Tarigan ada empat dasar atau patokan yang digunakan dalam pengklasifikasian buku teks yaitu:<sup>164</sup>

- a) berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi (terdapat di SD, SMTP, SMTA),
- b) berdasarkan mata kuliah bidang yang bersangkutan (terdapat di perguruan tinggi),
- c) berdasarkan penulisan buku teks (mungkin di setiap jenjang pendidikan),
- d) berdasarkan jumlah penulis buku teks.

Berdasar paparan di atas, ada dua golongan buku teks yaitu sebagai buku teks utama dan buku teks pelengkap yang keduanya dapat digolongkan lagi berdasarkan mata pelajaran, mata kuliah, penulisan buku teks, dan berdasar jumlah penulis buku teks.

Buku teks yang digunakan dalam pembelajaran juga harus memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan kurikulum pendidikan yang ada. Greene dan Petty telah merumuskan beberapa kriteria buku teks, yaitu:

- a) menarik minat anak-anak;
- b) mampu memberi motivasi kepada para siswa;
- c) memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa;
- d) mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa;
- e) isinya berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya;
- f) dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa;
- g) menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa;

---

<sup>164</sup> Tarigan dan Tarigan. *Op.Cit.* h.29

- h) mempunyai sudut pandangan atau “*point of view*” yang jelas dan tegas;
- i) mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai nilai anak dan orang dewasa,
- j) dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa.<sup>165</sup>

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa kualitas buku teks dapat dilihat berdasarkan aspek isi/materi, penyajian, serta aspek kebahasaan yang mampu dan mudah dipahami dan diterima oleh peserta didik. Materi dalam buku teks perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang berdasar pada kurikulum.

## 2) Perpustakaan

Perpustakaan adalah salah satu alat pendidikan yang berfungsi untuk mengatasi kebutuhan terhadap buku bagi pendidik maupun peserta didik. Menurut Yusuf<sup>166</sup>, perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti buku atau kitab, ditambah awalan per dan akhiran an sehingga menjadi perpustakaan yang berarti kumpulan buku – buku dan kitab – kitab. Secara umum perpustakaan mempunyai arti sebagai suatu tempat yang didalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan penyebarluasan (pelayanan) segala macam informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam dalam berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder, video, komputer, dan lain – lain.

---

<sup>165</sup> Tarigan dan Tarigan. *Op.Cit.* h. 20

<sup>166</sup> A. Muri Yusuf. *Metodologi Penelitian (Dasar-Dasar Penyelidikan. Ilmiah)*. (Padang: UNP Press, 2005), h.1

Dalam UU No. 43 Tahun 2007 disebutkan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.<sup>167</sup>

Mayor dalam bukunya *Longman dictionary of contemporary English* menguraikan makna perpustakaan ke dalam beberapa point, yaitu:

- a) *a building or part of a building which contains books that may be borrowed by the public (public library) or by members of a special group.*
- b) *a collection of books.*
- c) *a room or other place where books are kept and may be looked at, usually with tables at which to study.*
- d) *a set of books looking alike, usually on related subjects.*

Artinya:

- a) bangunan atau bagian dari bangunan yang berisi buku-buku yang dapat dipinjam oleh publik (perpustakaan umum) atau oleh anggota kelompok khusus.
- b) koleksi buku.
- c) sebuah ruangan atau tempat lain di mana buku disimpan dan dapat dilihat, biasanya dengan meja untuk belajar.
- d) satu set buku yang seragam, biasanya pada mata pelajaran terkait.<sup>168</sup>

Selanjutnya menurut Darmono, perpustakaan adalah salah satu bentuk organisasi sumber belajar yang menghimpun organisasi dalam bentuk buku dan bukan buku yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai

---

<sup>167</sup> Undang Undang No 43. Tahun 2007 tentang perpustakaan. (*Jakarta: Perpustakaan Nasional RI*)

<sup>168</sup> Mayor, M. (Ed.). *Longman dictionary of contemporary English*. (Pearson Education India, 2009), h.631

(Guru, siswa, dan masyarakat) dalam upaya mengembangkan kemampuan dan kecakapannya.<sup>169</sup>

Dari pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perpustakaan adalah suatu unit kerja yang mengelola informasi baik buku maupun bukan buku agar dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Selain itu perpustakaan juga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses pengembangan pembelajaran bagi pendidik maupun peserta didik.

Adapun fungsi perpustakaan menurut Hasibuan secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tempat penyimpanan. Menyimpan bahan perpustakaan yang diterimanya adalah Salah satu tugas pokok perpustakaan. Sebab semua jenis perpustakaan melakukan fungsi penyimpanan. Tugas inilah yang menyebabkan perpustakaan selalu disebut dengan istilah *document storage*;
- b) Pendidikan. Bagian dari dunia pendidikan adalah buku. Buku sering dihubungkan dengan perpustakaan. Sedangkan perpustakaan selalu dikaitkan sumber informasi yang menunjang berjalannya proses pembelajaran;
- c) Penelitian. Perpustakaan bertugas menyediakan bahan atau materi untuk keperluan penelitian;
- d) Informasi. Perpustakaan adalah institusi pengelola informasi;
- e) Kultural. Perpustakaan bertugas menyimpan khasanah budaya bangsa khususnya yang berupa media yang merekam informasi, naskah, manuskrip dan/atau dokumen lainnya;
- f) Rekreasi. Pengguna perpustakaan dapat menikmati rekreasi dengan cara membaca.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup> Darmono. *Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Aspek Manajemen dan Tata Kerja*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h.1

<sup>170</sup> Jonner Hasugian. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, (Medan: USU Press, 2009), h.82-85

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan dan pengembangannya baik pendidik maupun peserta didik.

b) Alat Peraga dalam Pendidikan (Audiovisual Aids)

Alat peraga atau yang disebut dengan alat bantu pendidikan adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan / pengajaran. Alat bantu ini lebih sering disebut alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan meragakan sesuatu dalam proses pendidikan pengajaran. Alat-alat peraga yaitu alat-alat pelajaran secara pengindraan yang tampak dan dapat diamati.<sup>171</sup> Alat peraga merupakan tiap-tiap benda yang dapat menjelaskan suatu ide, prinsip, gejala atau hukum alam. Apabila dalam proses belajar mengajar guru tidak menggunakan alat peraga, maka sulit bagi siswa untuk menyerap konsep-konsep pelajaran yang disampaikan guru sehingga berdampak pada kurangnya tingkat keberhasilan siswa dalam belajar.<sup>172</sup>

Estiningsih menyebutkan bahwa alat peraga merupakan media pengajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari.<sup>173</sup> Sedangkan Sudjana mendefinisikan alat peraga

---

<sup>171</sup> Drs. H.M. Hafi Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. (Surabaya-Indonesia : Usana Offset Pringting, 1982), h.59

<sup>172</sup> R.M. Soelarko, *Audio Visual Media Komunikasi Ilmiah Pendidikan Peneragnan*, (Jakarta: Bina Cipta, 1995), h.6

<sup>173</sup> Elly Estiningsih. Analisis GBPP SD 1994. (*Bahan Ajar untuk Program PenataranBaca, Tulis, Hitung yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Dasar,1994*) h.7

sebagai suatu alat bantu untuk mendidik atau mengajar supaya apa yang diajarkan mudah dimengerti anak didik dan dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien.<sup>174</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wijaya dan Rusyan,<sup>175</sup> yang dimaksud Alat Peraga Pendidikan adalah media pendidikan berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Sumadi menambahkan bahwa alat peraga atau AVA adalah alat untuk memberikan pelajaran atau yang dapat diamati melalui panca indera. Alat peraga merupakan salah satu dari media pendidikan adalah alat untuk membantu proses belajar mengajar agar proses komunikasi dapat berhasil dengan baik dan efektif.<sup>176</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa fungsi utama alat peraga pendidikan adalah untuk menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu menangkap arti konsep tersebut sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Sebagai contoh, benda-benda konkret disekitar siswa. Dengan adanya alat peraga siswa dapat mengetahui letak bilangan positif dan bilangan negatif.

---

<sup>174</sup> Sudjana. *Berbagai Media Gambar Sebagai Alat Peraga*. (Jakarta: Pustaka. 2009),h.76

<sup>175</sup> Cece Wijaya dan A. Thabrani Rusyan, *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h.134

<sup>176</sup> Sumadi, *Belajar dengan Media Pembelajaran*. (Karya Ilmiah Universitas Negeri Yogyakarta.1972), h.4

Pada garis besarnya, hanya ada 3 macam alat bantu pendidikan (alat peraga) :

1) Alat Bantu Lihat (Visual Aids)

Alat peraga ini lebih pada alat yang bisa dipandang contohnya adalah papan tulis, gambar-gambar dan poster, peta dan globe, tamasya atau darmawisata, gambar film, dan lain-lain.<sup>177</sup> Alat ini berguna didalam membantu menstimulasi indera mata (penglihatan) pada waktu terjadinya proses pendidikan. Alat ini ada 2 bentuk :

- a) Alat yang diproyeksikan, misalnya slide, film, film strip, dan sebagainya.
- b) Alat-alat yang tidak diproyeksikan : 2 dimensi, gambar, peta, bagan, dan sebagainya. 3 dimensi misal bola dunia, boneka, dan sebagainya

2) Alat-Alat Bantu Dengar (*Auditio Aids*) :

Alat peraga ini muncul dalam bentuk suara diantaranya adalah type recorder, radio, televisi, film bicara, alat-alat musik, mikrofon, dan lain-lain.<sup>178</sup> Alat bantu ini dapat membantu menstimulasi indera pendengar pada waktu proses penyampaian bahan pendidikan / pengajaran. Misalnya piringan hitam, radio, pita suara, dan sebagainya.

---

<sup>177</sup> Wasty Soemanto, Hendyat Soetopo, *Dasar dan Teori Pendidikan Dunia Tantangan bagi Para Pemimpin Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982.) h.157

<sup>178</sup> Anshari. *Op.Cit.* h.63

### 3) Alat Bantu Lihat-Dengar/ Audio Visual Aids (AVA).

Alat-alat bantu lihat-dengar pendidikan ini lebih dikenal *Audio Visual Aids* (AVA), misalnya televisi dan video cassette.<sup>179</sup>

## 2) Metode

Metode pembelajaran merupakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran berlangsung. Metode menurut Djameluddin dan Abdullah Aly dalam *Kapita Selekta Pendidikan Islam*,<sup>180</sup> berasal dari kata *meta* berarti melalui, dan *hodos* jalan. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sudjana berpendapat bahwa metode merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. Penerapan dalam pembelajaran dikerjakan melalui langkah-langkah yang teratur dan secara bertahap yang dimulai dari penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pengajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar. Oleh sebab itu metode masih bersifat prosedural.<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup> Soekidjo Notoadmojo, *Prinsip-prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.12

<sup>180</sup> Djameluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung :1999) hal 114

<sup>181</sup> Nana Sudjana. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), h.76

Dalam bahasa Arab, kata metode mempunyai beberapa padanan kata yang digunakan seperti al-tariqah, manhaj, dan al-wasilah. Al-tariqah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan wasilah berarti perantara atau mediator. Sehingga, kata Arab yang dekat dengan arti metode adalah al-tariqah.<sup>182</sup> Dengan demikian metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.

Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin ilmu tersebut.<sup>183</sup> Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa metode sebenarnya berarti jalan untuk mencapai tujuan. Jalan untuk mencapai tujuan itu bermakna ditempatkan pada posisinya sebagai cara untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan ilmu atau tersistemisasikannya-suatu pemikiran. Dengan pengertian yang terakhir ini, metode lebih memperlihatkan sebagai alat untuk mengolah dan mengembangkan suatu gagasan sehingga menghasilkan suatu teori atau temuan.<sup>184</sup>

Muhammad Athiyah al-Abrasyi mengartikan metode sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman pada peserta didik.

---

<sup>182</sup> Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006) h. 144.

<sup>183</sup> Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), h.85.

<sup>184</sup> Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 2006) h.183

Abd al-Aziz mengartikan metode dengan cara-cara memperoleh informasi, pengetahuan, pandangan, kebiasaan berpikir, serta cinta kepada ilmu, guru, dan sekolah.<sup>185</sup> Menurut Nana Sudjana terdapat bermacam-macam metode dalam pembelajaran, yaitu:<sup>186</sup>

a) Metode Ceramah,

Metode Ceramah yaitu cara penyampaian informasi secara lisan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Metode ini merupakan yang paling banyak digunakan dalam kesempatan penyampaian informasi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Hal ini diakibatkan adanya kemampuan setiap orang untuk berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada orang lain.

b) Metode Tanya Jawab,

Metode Tanya Jawab yaitu cara penjelasan informasi yang pelaksanaannya saling bertanya dan menjawab antara sumber belajar dengan warga belajar.

c) Metode Diskusi Kelompok,

Metode Diskusi Kelompok yaitu cara pembahasan suatu masalah oleh sejumlah anggota kelompok untuk mencapai suatu kesepakatan.

d) Metode Resitasi,

---

<sup>185</sup> Omar Muhammad al-Thaumi al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h.551-552.

<sup>186</sup> Sudjana, Nana. 1989. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Al Gesido), h.78– 86.

Metode Resitasi yaitu cara pemberian tugas yang dilakukan oleh sumber belajar kepada warga belajar yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, serta dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.

e) Metode Kelompok Kerja,

Metode kelompok kerja adalah cara pembelajaran yang melibatkan peserta dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas.

f) Metode Demonstrasi

Metode Demonstrasi yaitu cara memperagakan sesuatu hal yang pelaksanaannya diawali oleh peragaan sumber belajar kemudian diikuti oleh warga belajar. Hal yang diperagakan adalah harus kegiatan yang sebenarnya, tidak bersifat abstrak.

g) Metode Sosiodrama (*role-playing*)

Metode Sosiodrama yaitu cara permainan yang pelaksanaannya berupa peragaan oleh warga belajar dengan tekanan utama pada karakteristik/sifat seseorang dengan dasar memerankan tingkah laku dalam situasi tertentu dengan didasarkan pada cerita yang utuh, yang dilanjutkan dengan kegiatan diskusi tentang masalah yang baru diperagakan.

h) Metode *Problem solving*

Metode pemecahan masalah (*problem solving*) adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan

melatih siswa menghadapi berbagai masalah baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama.

i) Metode Sistem Regu (*Team Teaching*)

Team teaching atau pengajaran beregu dapat didefinisikan sebagai kelompok yang beranggotakan dua orang guru atau lebih yang bekerja sama untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran bagi kelompok peserta didik yang sama. Dalam kebersamaan itu mereka membuat perencanaan pembelajaran, bersama-sama menyajikan materi, dan bersama-sama pula melakukan evaluasi, remedial dan pengayaan. Kerja sama dilakukan dengan membagi tanggung jawab dan peran yang jelas dalam mencapai tujuan yang lebih baik daripada pembelajaran yang ditangani sendiri.

j) Metode Latihan (*Drill*),

Metode drill yaitu cara melatih warga belajar tentang kegiatan-kegiatan tertentu secara berulang-ulang dengan materi yang sama.

**e. Lingkungan pendidikan**

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada anak yaitu lingkungan dimana proses pendidikan

berlangsung dan lingkungan di mana anak-anak bergaul sehari-harinya.<sup>187</sup> Djamarah menjelaskan bahwa Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan biotic dan abiotik tidak dapat dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh anak didik sebagai makhluk hidup yang tergolong kelompok biotic.<sup>188</sup>

Zakiah Daradjat, menambahkan dalam arti yang luas lingkungan mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan dan alam. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia, atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Sejauh manakah seseorang berhubungan dengan lingkungannya, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh pendidikan kepadanya. Selanjutnya, dia juga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang lingkungan, bagi para pendidik merupakan alat untuk dapat mengerti, memberikan penjelasan dan mempengaruhi anak secara lebih baik. Misalnya, anak manja biasanya berasal dari lingkungan keluarga yang anaknya

---

<sup>187</sup> Hafi Anshari, *Op.Cit*, h.90

<sup>188</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002), h. 142

tunggal atau anak yang nakal di sekolah umumnya di rumah mendapat didikan.<sup>189</sup>

Oleh karena itu, Ramayulis dalam bukunya menjelaskan bahwa Lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan pendidikan islam. Karena perkembangan jiwa anak itu sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Lingkungan dapat memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, sikapnya, akhlaknya, dan perasaan agamanya. Positif apabila memberikan dorongan terhadap keberhasilan proses pendidikan itu. Dikatakan negatif apabila lingkungan menghambat keberhasilan. Pengaruh tersebut terutama datang dari teman sebaya dan masyarakat lingkungannya.<sup>190</sup> Walgito menyebutkan bahwa lingkungan secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>191</sup>

- 1) Lingkungan fisik adalah lingkungan yang ada disekitar manusia berupa kondisi alam, misalnya keadaan tanah, keadaan musim, dan lain sebagainya.
- 2) Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat. Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap perkembangan individu berbeda-beda, sebab interaksi yang dilakukan individu satu dengan individu yang lain di masyarakat juga berbeda-beda.

---

<sup>189</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), h. 77

<sup>190</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia. 2002),h.103

<sup>191</sup> Bimo Walgito. *Pengantar psikologi Umum*. (Jakarta: Penerbit Andi,2004), h.51

Bila kita teliti mulai dari masyarakat dan kebudayaan yang sederhana, maka lembaga-lembaga pendidikan meliputi Keluarga/Informal, Sekolah/Formal, Masyarakat/Non Formal. Ketiga lembaga pendidikan tersebut dalam konsep Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Tripusat pendidikan. Fudyartanta dalam bukunya yang berjudul *Buku Ketaman Siswaan* (1990) menyebutkan Tripusat Pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara pendiri Taman Siswa yang diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tripusat pendidikan yang dimaksudkan disini adalah lingkungan pendidikan ini meliputi “pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan perguruan/sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat/pemuda”.<sup>192</sup>

Menurut Ahmadi, Ada beberapa hal yang menarik dalam keterangan Ki Hajar Dewantara tentang Tripusat Pendidikan, diantaranya:<sup>193</sup>

- 1) Tujuan Pendidikan tidak mungkin tercapai hanya melalui satu jalur;
- 2) Ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan akrab serta harmonis;

---

<sup>192</sup> Fudyartanta, *Buku Ketaman Siswaan*, (Yogyakarta: tp. 1990), h.39

<sup>193</sup> Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rum Media, 2014), h. 171

- 3) Pusat pendidikan yang terpenting adalah lingkungan keluarga karena mampu memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial;
- 4) Perguruan sebagai balai wiyata yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan ketampilan;
- 5) Lingkungan masyarakat sebagai tempat berlatih anak membentuk watak atau karakter dan kepribadiannya;
- 6) usaha untuk menghidupkan, menambah dan memberikan perasaan kesosialan sang anak.

Ketiga lembaga pendidikan ini sebagai tripusat pendidikan artinya, tiga pusat pendidikan yang secara bertahap dan terpadu mengemban tanggung jawab pendidikan bagi generasi muda serta mempunyai saling keterkaitan yang sangat erat. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari :

- 1) Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga.
- 2) Karena keterbatasan orangtua dalam mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah.
- 3) Masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan ketrampilannya.

Diantara ketiga kaitan diatas, meunjukkan lingkungan sosial yang paling awal dilalui oleh setiap manusia adalah keluarga yang kemudian dilengkapi dengan lingkungan pendidikan di sekolah dan

lingkungan masyarakat secara lebih luas. Demikian pula kebudayaan seperti bahasa, adat istiadat, kebiasaan, hasil seni, peraturan, merupakan lingkungan yang memberikan pengaruh yang cukup berarti bagi perkembangan individu.

### **1) Lingkungan Pendidikan Keluarga**

Menurut Rosdiana Bakar lingkungan pendidikan keluarga adalah yang terdapat didalam rumah tangga yang diberikan oleh kedua orang tua. Ini merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak, yang terbentuk berdasarkan kodrat dan secara suka rela. Keluarga adalah inti masyarakat. Disinilah anak didik mulai mengenali kehidupan dan pendidikan.<sup>194</sup> Menurut Zakiah Drajat keluarga merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan di antara golongannya bersifat khas. Di lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. Disini pendidikan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku didalamnya, tanpa harus diumumkan dan dituliskan terlebih dahulu serta kehidupan keluarga selalu mempengaruhi perkembangan budi pekerti/ akhlak setiap manusia. Pendidikan keluarga diletakkan dasar-dasar pengalaman melalui rasa kasih sayang dan penuh kecintaan, kebutuhan, kewibawaan dan nilai-nilai kepatuhan. Justru karena hubungan demikian itu berlangsung hubungan yang bersifat

---

<sup>194</sup> Rosdiana A. Bakar, M.A., 2009. *Pendidikan Suatu Pengantar*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis), h.128.

pribadi dan wajar, maka penghayatan terhadapnya mempunyai arti sangat penting.<sup>195</sup>

Menurut Mohammad Surya bahwa dari sekian banyak faktor-faktor yang mengkondisikan penyesuaian diri, tidak ada satupun faktor yang lebih penting selain daripada faktor rumah dan keluarga. lingkungan yang paling awal bagi perkembangan individu adalah Rahim ibu yang kemudian berkembang pada lingkungan yang lebih luas, seperti pola dan kualitas pertumbuhan dan perkembangan individu lingkungan tersebut. Lingkungan alam tempat individu dilahirkan dan dibesarkan akan banyak mempengaruhi kondisi perkembangan individu.<sup>196</sup> Keadaan individu sebelum lahir ditentukan oleh faktor-faktor keturunan atau warisan yang didukung oleh keluarganya, mengenai kejasmanian dan kerohaniannya, kemudian dengan kelahirannya dimulailah pengaruh-pengaruh luar atau lingkungan yang menghambat ataupun menyuburkan potensi yang ada dalam setiap diri individu.<sup>197</sup> Melalui pendidikan keluarga, anak diharapkan memiliki pribadi yang mantap, akhlak yang baik dan mandiri untuk menjalani kehidupannya. Sehingga dalam hal ini pendidikan

---

<sup>195</sup> Zakiah Drajat. *Op.cit.* h 66

<sup>196</sup> Mohamad Surya. *Psikologi Konseling*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2014), h.180

<sup>197</sup> Wasty Soemanto, Hendyat Soetopo, *Dasar dan Teori Pendidikan Dunia Tantangan bagi Para Pemimpin Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982), h.163.

keluarga dapat dikatakan sebagai wadah persiapan anak untuk kehidupan bermasyarakat.<sup>198</sup>

Maka dari itu, dapat dikatakan keluarga sebagai kesatuan hidup bersama yang pertama dikenal oleh anak, karena itu disebut *Primary Community*. maka pendidikan keluarga berfungsi untuk:<sup>199</sup>

- a) Pengalaman pertama masa kanak-kanak
- b) Menjamin kehidupan emosional anak
- c) Menanamkan dasar pendidikan moral/akhlak
- d) Memberikan dasar pendidikan sosial
- e) Peletakan dasar-dasar keagamaan.

## 2) Lingkungan Pendidikan Sekolah

Menurut Rosdianan Bakar tidak semua tugas pendidikan dapat dilaksanakan oleh orang tua, terutama dalam memberi ilmu pengetahuan dan dengan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu dimasukkan anak ke sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, sehingga disebut pendidikan formal.<sup>200</sup> Sekolah sebagai lembaga formal mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan, yang di dalamnya terdapat suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan

---

<sup>198</sup> Arif Rohman. *Memahami Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta : Laks Bang Mediatama, 2011), h.199-200

<sup>199</sup> Lihat Driyakarya 1950: 50; Meichati, 1976: 112, Wens Tanlain, 1989: 40

<sup>200</sup> Rosdiana Bakar. *Op.Cit.* h.47

pendidikan tertentu.<sup>201</sup> Kemudian sekolah juga sebagai lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur dan terencana.<sup>202</sup> Menurut Syaodili Lingkungan sekolah juga menyangkut lingkungan akademis, yaitu sarana dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, berbagai kegiatan kurikuler, dan lain sebagainya.<sup>203</sup>

Sekolah sebagai tempat kedua selain keluarga dalam pembentukan karakter dan pribadi anak, mempunyai tujuh fungsi, yaitu:<sup>204</sup>

- a) Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan.
- b) Mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh, menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan kecerdasan.
- c) Spesialisasi

Semakin meningkatnya diferensiasi dalam tugas kemasyarakatan dan lembaga sosial, sekolah juga sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

---

<sup>201</sup> Uyoh *Sabdulloh. Pedagogik Ilmu Mendidik.* (Bandung: Alfabeta, 2010) h.196

<sup>202</sup> Zakiyah Drajat. *Op.Cit.* h.77

<sup>203</sup> Nana Syaodili. *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi.* (Bandung:Yayasan Kusuma Karya, 2004), h.164

<sup>204</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Pendidikan,* (Jakarta : Rajawali,2006), h.34-35.

## d) Efisiensi

Terdapatnya sekolah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran maka pelaksana pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisien.

## e) Sosialisasi

Sekolah membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang beradaptasi dengan baik di masyarakat.

## f) Konservasi dan transmisi kultural

Ketika masih berada di keluarga, kehidupan anak selalu menggantungkan diri pada orang tua, maka ketika memasuki sekolah ia mendapat kesempatan untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan sebelum ke masyarakat.

Sedangkan menurut Wahyudi dalam buku Rulam Ahmadi (Pengantar Pendidikan), sekolah memiliki fungsi:<sup>205</sup>

- a) Fungsi Transmisi Kebudayaan, yang dibedakan menjadi dua macam. Kedua transmisi tersebut dikategorikan menjadi Transmisi Pengetahuan dan Keterampilan, Transmisi Sikap, Nilai dan Norma
- b) Fungsi memilih dan mengajarkan Peranan Sosial
- c) Fungsi Integrasi Sosial

---

<sup>205</sup> Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rum Media, 2014), h.195-198

- d) Fungsi Inovasi Sosial
- e) Fungsi Pengembangan Kepribadian Anak

Hasbullah menambahkan, selain fungsi, lingkungan sekolah juga mempunyai peran terhadap dunia pendidikan adalah:<sup>206</sup>

- a) Sekolah membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik.
- b) Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan didalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan dirumah.
- c) Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan.
- d) Disekolah diberikan pelajaran estetika, keagamaan, etika, membedakan benar atau salah dan sebagainya.

Fungsi dan peran sekolah mampu terakomodir dengan baik apabila faktor pendukung tersedia. Menurut Tulus Tu'u faktor lingkungan sekolah sebagai berikut:<sup>207</sup>

- a) Guru

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dengan ilmu dan keterampilan

---

<sup>206</sup> Hasbulloh. *Op. Cit.*, h.33-34

<sup>207</sup> Tulus Tu'u. *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. (Jakarta: Grasindo, 2004), h.18

yang dimiliki, guru dapat menjadikan siswa menjadi individu yang cerdas dan disiplin.

b) Sarana dan prasarana

Prasarana dan sarana pembelajaran merupakan faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang tertata rapi, ruang perpustakaan sekolah yang teratur, tersedianya fasilitas kelas dan laboratorium, tersedianya buku-buku pelajaran, media/alat bantu belajar merupakan komponen yang penting untuk mendukung kegiatan-kegiatan belajar.

c) Kondisi gedung

Diantaranya ventilasi udara yang baik, sinar matahari dapat masuk, penerangan lampu yang cukup, ruang kelas yang luas, kondisi gedung yang kokoh. Apabila suasana ruang gelap, ruangan sempit, tidak ada ventilasi dan gedung rusak akan menjadikan proses belajar yang kurang baik sehingga memungkinkan proses belajar menjadi terhambat

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi lingkungan sekolah adalah membantu menciptakan serta menanamkan budi pekerti serta karakter yang baik, dimana pendidikan tersebut tidak dapat diberikan di rumah atau keluarga.

### 3. Lingkungan Pendidikan Masyarakat

Masyarakat adalah lingkungan pendidikan non formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis. Pendidikan masyarakat terjadi secara tidak langsung, dalam arti anak mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri akan nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan didalam masyarakat.<sup>208</sup> Menurut pendidikan Islam, konsep pendidikan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan mutu dan kebudayaan agar terhindar dari kebodohan. Usaha-usaha tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan masyarakat seperti kegiatan keagamaan, sehingga diharapkan adanya rasa memiliki dari masyarakat dan akan membawa pembaharuan dimana masyarakat memiliki tanggung jawab terlebih-lebih untuk meningkatkan kualitas pribadi ilmu, ketrampilan, kepekaan perasaan dan kebijaksanaan. Dengan kata lain peningkatan wawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik.<sup>209</sup>

Menurut Arifin setidaknya ada dua macam bentuk masyarakat dalam komunitas kehidupan manusia. *Pertama*, kelompok primer yaitu kelompok dimana manusia mula-mula berinteraksi dengan orang lain secara langsung, seperti keluarga dan masyarakat secara umum. *Kedua*, kelompok sekunder yaitu kelompok yang dibentuk secara sengaja atas pertimbangan dan kebutuhan tertentu, seperti perkumpulan

---

<sup>208</sup> Zakiah Drajat, *Op.Cit.*h. 45

<sup>209</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Intrepetasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 228-230.

profesi, sekolah, partai politik, dan sebagainya. Kesatuan visi ini secara luas kemudian membentuk hubungan yang komunikatif dan dinamis, sesuai dengan tuntutan perkembangan zamannya. Bila penjelasan di atas ditarik dalam konsep pendidikan, menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik, Sebab, keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternative bagi memperkaya pelaksanaan proses pendidikan.<sup>210</sup>

Masyarakat ikut mempengaruhi terbentuknya sikap sosial para anggotanya, melalui pengalaman berulang kali dengan mengalami yang beraneka ragam itu maka, sikap sosial anggotanya pun beraneka ragam pula. Pendidikan dalam masyarakat adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pendewasaan anggotanya melalui sosialisasi yang diletakkan dasar-dasarnya oleh keluarga dan sekolah sebelum mereka masuk kedalam masyarakat.<sup>211</sup> Sedangkan Umar Tirtarahardja dan La Sulo mengemukakan kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, mempunyai peran dan fungsi edukatif, dan masyarakat sebagai sumber belajar.<sup>212</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, masyarakat sebagai lembaga pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu

---

<sup>210</sup> Arifin. *pendidikan islam suatu tinjauan teoritis dan praktis berdasarkan pendekatan interdisipliner*.(Jakarta: bumi aksara.1993), h.33

<sup>211</sup> Karsidi, Ravik. *Sosiologi Pendidikan*, (Surakarta : UNS Press, 2005), h.40

<sup>212</sup> Umar Tirtarahardja dan La Sulo. *Op. Cit.* h179

sendiri besar sekali perannya. Kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Resbin L. Sihite mengemukakan tujuh peran serta masyarakat dalam pendidikan yaitu:<sup>213</sup>

- a. Sebagai sumber pendidikan
  - b. Sebagai pelaku pendidikan
  - c. Pelaksana pendidikan
  - d. Pengguna hasil pendidikan
  - e. Perencanaan pendidikan
  - f. Pengawasan pendidikan
- 1) Evaluasi program pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas lingkup peran serta masyarakat secara menyeluruh mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pendidikan saling berkaitan. Sehingga keberhasilan pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dikemukakan oleh Yusuf Hadi Miarso bertujuan untuk:<sup>214</sup>

- a) Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan.

---

<sup>213</sup> Sihite, Resbin L. Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan. *Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga* (Jakarta.. 2007), h.15

<sup>214</sup> Yusuf hadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h.709.

- b) Terselenggaranya kerja sama yang saling menguntungkan (memberi dan menerima) antara semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.
- c) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penmanfaatan sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan seperti dana, fasilitas, dan peraturan-peraturan termasuk perundang-undangan.
- d) Meningkatkan kinerja sekolah yang berarti pula meningkatnya produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana pendidikan.

## 5. Pendidikan dalam Perspektif Islam

Menurut Abdullah Idi dan Toto Suharto, menjabarkan bahwa pendidikan Islam adalah sebuah proses bimbingan dan pembinaan semaksimal mungkin yang diberikan kepada seseorang melalui ajaran Islam agar orang tersebut tumbuh dan berkembang sesuai tujuan yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah tercapainya pengembangan potensi diri seseorang dalam segala aspeknya melalui proses pembelajaran yang maksimal; sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah terbentuknya kepribadian muslim paripurna sehingga orang tersebut dapat mengfungsikan dirinya secara individual maupun sosial demi kebahagiaan dunia akhirat<sup>215</sup>

---

<sup>215</sup> Abdullah Idi, Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 51

Proses pendidikan pertama dalam Islam terjadi ketika Malaikat Jibril as datang menemui Nabi Muhammad Saw. yang sedang berada di gua Hira. Dalam pengajarannya Jibril as meminta kepada Nabi Saw. untuk membaca dan mengikuti apa yang dibacakan kepadanya yaitu Surat al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang merupakan bukti bahwa turunya Islam ditandai dengan adanya pendidikan dan pengajaran sebagai pondasi yang kokoh setelah konsep iman, islam dan ihsan. sebagai mana yang terdapat pada makna ayat Alquran sebagai berikut:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya.”<sup>216</sup>

Ayat Alquran di atas telah mengisyaratkan ada empat pokok bahasan, yaitu sebagai berikut:

“Pertama, manusia sebagai subyek dalam membaca, memperhatikan, merenung, meneliti dengan asas niat yang baik yang ditandai dengan menyebut nama Tuhan. Kedua, objek yang dibaca, diperhatikan, dan direnungkan, yaitu materi dan proses penciptaan hingga menjadi manusia sempurna. Ketiga, media dalam melakukan aktivitas membaca dan lain-lain. Dan keempat, motivasi dan potensi yang dimiliki oleh manusia, “rasa ingin tahu”.<sup>217</sup>

H. Muzayyin Arifin mengatakan bahwa pemahaman ayat di atas semakna jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pendidikan

---

<sup>216</sup> Kemenag RI, *Op.cit*, h.597

<sup>217</sup> H. Abdul Rahman, *Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam, Tinjauan Epistemologi dan isi materi*, Jurnal Eksis, Vol 8 No.1, Maret 2012, h.2054

dalam arti mikro, yaitu: pendidik, anak didik, dan alat-alat pendidikan, baik yang bersifat materiil maupun non materiil.<sup>218</sup>

Dalam konsep Islam, pendidikan merupakan proses terus menerus dalam kehidupan manusia dari masa umur 0 (nol) menuju manusia sempurna (dewasa). Muhammad Abdul Alim mengatakan bahwa pendidikan itu dimulai dari ketika memilih perempuan sebagai isteri. Muhammad Abdul Alim berdasar pada hadis Nabi Saw: *تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس*. Artinya: Pilihlah olehmu tempat benih kamu, sebab akhlak ayah itu menurun kepada anak”.<sup>219</sup>

Mengacu kepada definisi pendidikan islam, terdapat beragam pengertian dalam memberikan definisi terhadap pendidikan Islam. konsep pendidikan Islam erat kaitannya dengan perbedaan istilah yang dipakai para ahli untuk menggambarkan konsep pendidikan Islam yang tepat. Istilah yang kerap dipakai dalam memperoleh makna pendidikan islam adalah *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib* yang menjadi pembahasan hangat di kalangan para ahli.

Telah di kemukakan oleh Ahmad Tafsir bahwa rumusan yang jelas mengenai definisi pendidikan menurut Islam belum mencapai finalnya. Hal ini merujuk pada hasil Konferensi Internasional Pendidikan Islami Pertama yang diselenggarakan oleh Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, pada tahun 1977 dan pada tahun 1980 di Islamabad yang belum berhasil membuat rumusan yang jelas tentang definisi pendidikan Islam.<sup>220</sup>

---

<sup>218</sup> H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),h. 8

<sup>219</sup> Muhammad Abdul Alim, *Al-Tarbiyah wa al-Tanmiyah.. fi al-Islam*, (Riyadh: KSA, 1992), h. 44-45.

<sup>220</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), Cet. ke-2, h. 39.

Kesimpulan dari hasil konferensi tersebut adalah bahwa pengertian pendidikan Islam adalah keseluruhan makna yang terkandung di dalam istilah *ta'lim*, *tarbiyah*, dan *ta'dib*. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam berikut ini penulis uraikan pendapat para ahli terkait istilah *ta'lim*, *tarbiyah*, dan *ta'dib* sebagai rumusan konsep pendidikan Islam.

#### a. *Tarbiyah*

Maragustam mengatakan Istilah *tarbiyah* berasal dari tiga kata yaitu: رَبَّ dan رَبِّي رَبًّا. Kata يَرْبُو رَبًّا - يَنْمُو نِمًا artinya adalah bertambah; tumbuh menjadi besar. Kata يَرْبِي رَبِّي - يَرْبِي رَبًّا dengan diikutkan lafadz يَخْفَى - يَخْفَى berarti naik, menjadi besar/dewasa, tumbuh, berkembang. Kata يَرْبُو رَبًّا - يَرْبُو رَبًّا yang artinya adalah أَصْلَحَهُ yakni memperbaikinya, kemudian تَوَلَّى سَأَسَهُ yaitu mengurusinya, bertanggung jawab atasnya, kemudian قَامَ عَلَيْهِ yaitu melatih; mengatur; memerintah, kemudian رَاعَى yaitu mengamati, membantu, dan رَاعَى yaitu memelihara, memimpin.<sup>221</sup>

Dengan melihat penjelasan tiga suku kata diatas diatas, dari segi etimologis tiga asal kata *tarbiyah* mempunyai makna yang cukup luas sebagai mana berikut:

1. الزيادة والنماء yang berarti berkembang dan bertambah, menjadi besar sedikit demi sedikit,
2. أصلح yang berarti memperbaiki siswa jika proses perkembangan menyimpang dari nilai-nilai Islam,

---

<sup>221</sup> Maragustam, *Mencetak Pembelajar Menjadi Insan Paripurna (Falsafah Pendidikan Islam)* (Yogyakarta: Nuha Litera, 2010), h.21.

3. نشأ yang berarti yang berarti mendidik, mengasuh, dalam arti materi (fisik) dan immateri (kalbu, akal, jiwa, dan perasaannya), yang kesemuanya adalah aktifitas pendidikan
4. ساسه وتولى أمره yang berarti mengurus urusan anak didik, bertanggung jawab atasnya dan melatihnya,
5. راعه yang berarti memelihara dan memimpin sesuai dengan potensi yang dimiliki dan tabiatnya.<sup>222</sup>

Dari sinilah sehingga Abdurrahman An-Nahlawi merumuskan definisi pendidikan Islam dari kata *tarbiyah*.<sup>223</sup> Ahmad Tafsir mengutip pendapat Al-Baidlawi juga berpendapat sama dengan An-Nahlawi, menurutnya arti kata *ar-rabb* adalah *at-tarbiyah*, yaitu menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna<sup>224</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat difahami bahwa definisi pendidikan Islam dengan bertolak dari tiga kata tersebut adalah sebuah proses pengembangan seluruh potensi anak didik secara bertahap menurut ajaran Islam.

Sedangkan al-Attas memiliki pendapat yang berbeda dengan Al-Nahlawi, menurutnya, penggunaan term *tarbiyah* kurang tepat untuk menunjuk pendidikan Islam. Ada beberapa faktor yang menurutnya menjadi alasan kenapa term *tarbiyah* kurang tepat, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>222</sup>Khalid ibn Hamid Al-hazimi, *Usul At-tarbiyah Al-islamiyah*, (Al-madinah Al-munawarah: Dar Al-alim Al-kutub, 2000), h. 17

<sup>223</sup>Abdurrahman al-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, Terj. Shihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.20

<sup>224</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, *Op.cit*, h. 40

1. Secara semantik pada kata *tarbiyah* masih bersifat umum dan tidak spesifik dipakai untuk mendidik manusia, namun juga dapat digunakan untuk makhluk lain, seperti mineral, tanaman, dan hewan.
2. *Tarbiyah* bersifat material; ia mengandung arti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membuat, menjadikan
3. Arti kata *rabba* yang dianggap sama dengan *tarbiyah* (pendidikan) dalam QS. Al-Isra': 24:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي  
صَغِيرًا ۚ ﴿سورة الإسراء: ٢٤﴾

Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"(QS. Al-isra': 24)<sup>225</sup>

Kata *rabba* dalam ayat diatas artinya adalah “kasih sayang”. Karena huruf *kaf* pada kalimat *kama rabbayani* adalah *kaf tasybih* yang menunjukkan kemiripan makna kata sebelum dan sesudahnya, yaitu kata *irhamhuma* (*rahmah*) dan *rabbayani* (*tarbiyah*). Dengan begitu makna *tarbiyah* lebih pada *rahmah* (kasih sayang).<sup>226</sup>

<sup>225</sup> Kemenag RI, *Op.Cit.*, h.284

<sup>226</sup> Muhammad an-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Terj. Haidar Bagir (Bandung: Mizan, 1984), h.35

## b. *Ta'lim*

Selain istilah *tarbiyah*, istilah *ta'lim* juga digunakan dalam pendidikan Islam. Dalam sejarah islam istilah *mu'allim* digunakan untuk istilah pendidik. Menurut konsep pendidikan Islam, kata *ta'lim* lebih luas cakupannya dan lebih umum daripada kata *tarbiyah*.<sup>227</sup> Alasannya adalah bahwa tujuan dari diutusnya Nabi Muhamamd Saw untuk menjadi *mu'allim* (pendidik) sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut;

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ  
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٥١

﴿سورة البقرة: ١٥١﴾

Artinya: Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. al-Baqarah: 151)<sup>228</sup>

Abdul Fatah Jalal berpendapat seperti dikutip Maragustam dikatakan bahwa proses *ta'lim* lebih umum daripada proses *tarbiyah*. Menurutnya ada bebarapa alasan kenapa *ta'lim* lebih umum daripada *tarbiyah*, di antaranya sebagai berikut.<sup>229</sup>

1. Ketika mengajarkan membaca al-Qur'an kepada umat Islam, Rasulullah Saw tidak hanya sebatas membuat mereka sekedar bisa

<sup>227</sup> Maragustam, *Mencetak Pembelajar Menjadi Insan Paripurna (Falsafah Pendidikan Islam)*, h. 24.

<sup>228</sup> Kementerian Agama RI, *Op.cit.*,h.151

<sup>229</sup> *Ibid.*, h. 25

membaca, namun membaca dengan perenungan yang berisikan pemahaman, pengertian, tanggung jawab, penanaman amanah sehingga terjadi pembersihan diri (*tazkiyahan-nufus*) dari segala perbuatan tercela, menjadikan mereka dalam kondisi siap menerima hikmah, dan mempelajari segala sesuatu yang belum diketahuinya yang berguna bagi mereka. Sementara kata *tarbiyah* merupakan proses persiapan dan pengasuhan pada fase pertama pertumbuhan manusia, atau pada fase bayi dan kanak-kanak. Misalnya seperti penggunaan kata *tarbiyah* pada QS. Al-Isra' ayat 24 yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Ayat tersebut menunjukkan, bahwa pendidikan pada fase anak-anak ini adalah tanggung jawab keluarga. Makna *tarbiyah* hanya pendidikan yang dilakukan pada masa anak-anak dan dilakukan oleh keluarga. Demikian juga pada QS. Asy-Syu'ara' ayat 18:

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝١٨

Artinya: Fir'aun menjawab: "Bukankah Kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama Kami beberapa tahun dari umurmu. (QS. Asy-Syu'ara: 18)<sup>230</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Fir'aun menyebutkan kebaikannya terhadap Musa bahwa dialah yang telah mendidik ketika kecil dan tidak dibunuh ketika itu. Ta'lim tidak hanya berhenti pada pencapaian pengetahuan berdasarkan prasangka atau yang lahir dari taklid

---

<sup>230</sup> *Ibid*, h.367

semata, ataupun pengetahuan yang lahir dari dongengan khayal dan syahwat atau cerita-cerita dusta.

2. Kata *ta'lim* mencakup aspek-aspek pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya serta pedoman perilaku yang baik.

Ini bisa diamati dari QS. Yunus:5 Sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا  
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ... ﴿سورة يونس: ٥﴾

Artinya “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)...(QS. Yunus: 5)<sup>231</sup>

Dari ayat diatas dipahami bahwa kata *ta'lim* mencakup berbagai aspek, di antaranya ilmu falak yang di dalamnya mencakup teoritis dan praktik, aspek pembuktian bahwa Allah adalah Maha Pencipta. Sehingga menurut Jalal kata *ta'lim* mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dan berlangsung sepanjang hayat serta tidak terbatas pada masa bayi dan kanak-kanak, tetapi juga orang dewasa. Jadi, berdasarkan analisis terhadap argumen yang diutarakan oleh Abdul Fatah Jalal mengenai konsep *ta'lim* di atas, maka *ta'lim* lebih luas serta lebih dalam daripada konsep tarbiyah. sebagaimana bahwa Nabi muhammad ditutus sebagai *muallim*.<sup>232</sup> Kemungkinan dari bersilangnya pendapat inilah maka konferensi pendidikan di Jeddah tahun 1977 hanya

<sup>231</sup> *Ibid.*,h.208

<sup>232</sup> Abd al-Fattaah Jalal, *Min al-Usul- al-Tarbiyah fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1977), h.16.

menyimpulkan secara umum, bahwa pendidikan menurut Islam terkandung di dalam tiga istilah *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*.

Sementara menurut Mahmud Yunus seperti dikutip Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan mengemukakan, bahwa konsep *ta'lim* lebih berkonotasi pada pembelajaran, yakni semacam proses transfer ilmu pengetahuan.<sup>233</sup> Dengan demikian *ta'lim* cenderung dipahami sebagai proses bimbingan yang dititikberatkan pada aspek peningkatan intelektualitas anak didik. Kecenderungan seperti ini pada batas-batas tertentu telah menimbulkan keberatan pakar pendidikan untuk memasukkan *ta'lim* ke dalam pengertian pendidikan, karena *ta'lim* hanya merupakan salah satu sisi pendidikan.

Muhammad Athiyah Al-Abrasy seperti dikutip Basuki dan Miftahul Ulum menyatakan, *ta'lim* memiliki makna yang lebih sempit daripada *tarbiyah*, karena hanya merupakan bagian dari *tarbiyah* yang dia usulkan sebagaimana Al-Nahlawi. Perbedaan antara *tarbiyah* dan *ta'lim* memiliki sangat mendasar, *tarbiyah* diartikan dengan mendidik, sedangkan *ta'lim* berarti mengajar. Orang yang mendidik berarti orang tersebut sedang membina, mengarahkan mempersiapkan anak didik dengan berbagai cara agar dapat digunakan tenaga dan bakatnya dengan baik, agar dapat mencapai kehidupan sempurna di masyarakat. sehingga *tarbiyah* mencakup pendidikan akal, kewarganegaraan, jasmaniyah, akhlak, dan kemasyarakatan. Sementara *ta'lim*

---

<sup>233</sup> Haitami Salim, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Cet. ke-1, h. 31

merupakan salah satu bagian dari aspek-aspek yang ada dalam tarbiyah tersebut.<sup>234</sup>

Al-Attas sebagaimana dikutip Maksum juga memahami bahwa *ta'lim* lebih dekat maknanya dengan pengajaran atau transfer ilmu dari seorang guru kepada murid.<sup>235</sup> dapat disimpulkan bahwa *ta'lim* belum menggambarkan konsep pendidikan Islam yang bisa mencakup semua dimensi yang harus tersentuh oleh pendidikan

### c. *Ta'dib*

Dalam bahasa Arab, kata *ta'dib* berasal dari bahasa memiliki tiga akar kata dan makna dasar sebagai berikut:

1. *Aduba – ya'dubu*, yang artinya adalah melatih dan membersihkan diri untuk berperilaku baik serta sopan santun.
2. *Adaba-ya'dubu*, artinya mengadakan pesta atau penjamuan, dan juga berarti berbuat dan berperilaku sopan.
3. *Addaba-yu'addibu*, yaitu bentuk kata kerja *mashdar ta'dib* yang berarti mendidik, mendisiplin, dan berperilaku sopan.<sup>236</sup>

Di tengah perselisihan makna *tarbiyah*, dan *ta'lim* untuk mewakili konsep pendidikan Islam. Menurut Naquib al-Attas, menyampaikan bahwa istilah *ta'dib* adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan pengertian pendidikan, sementara *tarbiyah* terlalu luas karena pendidikan dalam istilah ini mencakup juga pendidikan untuk hewan. Ia menjelaskan, bahwa istilah

---

<sup>234</sup> Basuki, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Ponorogo: Stain PO Press, 2007), h. 8.

<sup>235</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.18.

<sup>236</sup> Tadjab, *Dasar-dasar Kependidikan Islam* (Surabaya: Surya Aditama, 1996), h. 16.

*ta'dib* merupakan *masdar* dari kata kerja *addaba* yang berarti pendidikan. Dari kata *addaba* ini juga diturunkan kata *adabun*.<sup>237</sup>

Di antara argumentasi Naquib Al-Attas adalah bahwa kata *adabun* berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur sesuai dengan berbagai tingkatan mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual, maupun ruhaniah seseorang. Berdasarkan pengertian *adab* tersebut, Naquib Al-Attas mendefinisikan pendidikan Islam dengan usaha mengakui tempat Tuhan dalam kehidupan ini.

Selanjutnya Ramayulis mempertegas dengan mengutip pernyataan Naquib Al-Attas bahwa penggunaan istilah *tarbiyah* dan *ta'lim* tidak tepat untuk mewakili makna konsep pendidikan Islam. Menurutnya, struktur konsep *ta'dib* sudah mencakup unsur-unsur ilmu (*'ilm*), instruksi (*ta'lim*), dan pembinaan yang baik (*tarbiyah*), sehingga tidak perlu lagi dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam adalah sebagaimana yang terdapat dalam tiga serangkai konsep *tarbiyah-ta'lim-ta'dib* sebagaimana rumusan dalam konferensi pendidikan di Jeddah.<sup>238</sup>

Kemudian ditambahkan oleh Naquib Al-Attas, bahwa term *tarbiyah* yang selama ini dianggap sebagai pengertian yang lengkap mengenai pendidikan dalam Islam, baik salah satu (*tarbiyah* atau *ta'lim*) maupun

---

<sup>237</sup> Muhammad al-Naquib al-Attas, *Op.cit.*,h. 53.

<sup>238</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), Cet. ke-1, h. 2

keduanya (*tarbiyah wa ta'lim*), tidak menunjukkan kesesuaian makna. Beliau menolak istilah *tarbiyah*, sebab istilah ini hanya terbatas pada aspek fisik dalam mengembangkan tanaman-tanaman dan pada aspek fisik dan emosional dalam pertumbuhan dan perkembangan binatang dan manusia.<sup>239</sup> Jadi kesimpulan menurut Naquib al-Attas, bahwa *ta'dib* adalah sebuah konsep pendidikan Islam yang komprehensif dan integral, karena *ta'dib* telah mencakup konsep *tarbiyah* dan *ta'lim*.

Maragustam mengemukakan pendapatnya dalam rangka menyikapi *ijtihad* para ahli bahwa hal itu menunjukkan akan perhatian dan keseriusan mereka mengenai hal-hal berikut:

1. Mencari dan menemukan teori-teori pendidikan dan praktik pendidikan dalam bingkai Islam,
2. Keluasan objek lapangan pendidikan Islam yang tidak hanya terbatas ilmu keagamaan, namun juga ilmu keduniaan
3. Pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu.<sup>240</sup>

Mengenai istilah yang tepat untuk menunjuk pendidikan Islam, Maragustam, lebih cenderung kepada term *tarbiyah*. Alasan dipilih term *tarbiyah* karena pertimbangan berikut; (1) term *tarbiyah* dapat diperluas semantiknya, (2) term *tarbiyah* lebih umum dapat diterima oleh masyarakat terutama masyarakat muslim di Indonesia, dan (3) nilai sosial atau istilah

---

<sup>239</sup> M. Naquib al-Attas, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), h.180

<sup>240</sup> Maragustam, *Mencetak Pembelajar Menjadi Insan Paripurna (Falsafah Pendidikan Islam)*, (Jakarta: Nuha Litera, 2010), h. 28.

*tarbiyah* lebih umum dapat diterima dalam situasi daerah tertentu daripada term *ta'lim* dan *ta'dib*.<sup>241</sup>

Dengan demikian, term *tarbiyah* telah mencakup istilah *ta'lim* menurut Abdul Fatah Jalal, dan *ta'dib* sebagaimana yang ditawarkan oleh Naquib al-Attas. *Tarbiyah* merupakan konsep pendidikan Islam konprehensif yang tidak terbatas pada usia tertentu, mencakup jenis-jenis pendidikan (informal, formal, dan non formal), serta dapat menyentuh seluruh dimensi anak didik (materi atau kinestetik dan immateri) sehingga membentuk kepribadian muslim yang sempurna.

Bertolak dari ijtihad pakar tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengembangkan seluruh potensi atau *fitrah* manusia (jasmani, rohani dan akalanya) secara maksimal, sehingga membentuk kepribadian muslim yang sempurna baik secara individu maupun sosial, yang dapat memadukan fungsi ilmu, iman, dan amal secara integral bagi terbinanya kehidupan yang harmonis, baik dunia maupun akhirat.

---

<sup>241</sup> *Ibid*, h.53

## B. Pembahasan Hasil Karya yang Relevan

Untuk mengetahui dimana posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian yang lain maka perlu menjelaskan adanya penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang berkaitan dengan pengorganisasian dapat juga ditemui di beberapa jurnal ilmiah dan perpustakaan Perguruan Tinggi. Dan agar tidak terjadi plagiasi karya ilmiah dan untuk mengetahui dimana posisi penelitian ini perlu kita mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian jurnal oleh Md Golam Mohiuddin, Gaffar Olanrewaju Yusof, tentang aktifitas pengorganisasian yang sesuai dengan perintah Allah Swt. dan berdasar pada praktek Nabi Muammad Saw. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dokumenter / perpustakaan dan data dikumpulkan melalui sumber-sumber primer dan sekunder. Dalam penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Islam memiliki cara tersendiri yang sempurna dalam melaksanakan fungsi organisasi seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muamamd Saw, yaitu dengan menentukan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada saat sekarang ini menjadi harapan semua bangsa untuk mengarahkan perhatian pada cara Islam yang digambarkan dengan manajemen organisasi yang memiliki tujuan di dunia dan di akhirat.<sup>242</sup>

---

<sup>242</sup> Md Golam Mohiuddin, Gaffar Olanrewaju Yusof, Afroza Bulbu, *Organizing: An Islamic Perspective*, Jurnal Internasional: Global Disclosure of Economics and Business, Volume 2, No.2, 2013

Penelitian Md Golam Mohiuddin ini menitik beratkan pada animo dunia barat terhadap konsep-konsep manajemen berbasis agama Islam. Sedangkan pada penelitian yang telah kami lakukan menitik beratkan pada penggalian secara konprehensif tentang pengorganisasian pendidikan ditinjau dalam perspektif normatif dan historis.

2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Muhamamd Fathurrohman, dengan hasil penelitian bahwa Terdapat dua kata bantu yang terdapat dalam al-Qur'an untuk mempelajari pengorganisasian ini. Kata tersebut adalah *Shaff* dan *ummat*. Untuk kata *shaff*, menginspirasi konsep bahwa organisasi harus mempunyai anggota yang terdiri dari kumpulan orang-orang, berada dalam suatu wadah, terdapat keteraturan, mempunyai tujuan, juga mempunyai pemimpin, terjadi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta ada niat melaksanakan tugas dengan ikhlas dan berjuang di jalan Allah Swt. Kata *ummat* menginspirasi konsep bahwa organisasi ideal harus mempunyai elemen Ketaatan anggota, keteladanan pemimpin, tujuan organisasi, kesatuan komando dan AD/ART. Dalam pengambilan keputusan memakai sistem musyawarah. Sedangkan untuk menuju organisasi yang bermutu, organisasi harus menjalankan pilar-pilar mutu.<sup>243</sup>

Perbedaan penelitian Muhamamd Fathurrohman dengan penelitian penulis lakukan ini adalah pada penelitian Fathurrohman lebih berfokus pada organisasi dan perangkat-prangkatnya ditinjau dalam perspektif Al-

---

<sup>243</sup> Muhamamd Fathurrohman, *Pengorganisasian dalam Perspektif Al-qur'an dan Al-hadits*, Jurnal Edukasi, Volum 4, Nomor. 2, November 2016

Qur'an dan Al-Hadits, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana Islam berbicara konsep pengorganisasian dan penerannya dalam pendidikan. Didukung dengan data-data dari ahli tafsir tentang ayat Al-qur'an yang memberi makna dan konsep tentang pengorganisasian, sehingga didapat informasi tentang pengorganisasian pendidikan dalam perspektif Islam secara menyeluruh.

3. Penelitian Disertasi yang ditulis oleh Amani Abdul Aziz, penelitian ini berkaitan dengan teknik pemerintahan yang diadopsi oleh Khalifah. Penelitian bertujuan untuk menyebarkan pemikiran aturan yang seharusnya dan bijaksana berdasarkan pada pengalaman praktis, dan tidak hanya sekedar teoritis saja. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini dijelaskan dengan gambaran dalam menjalankan sebuah negara, di zaman Nabi dan para *Khalifah Ar-rasyidin*, Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali.

Jenis penelitian dan metodologi yang digunakan, adalah pendekatan analisis-historis, dengan penekanan pada "Diwan" pada masa dinasti Umayyah. Penelitian ini juga membahas tentang biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ditinjau dari bagaimana menjadi khalifah dan perannya dalam penyebaran Islam. Ini tercakup dalam bab ketiga dari penelitian. Bab keempat ditangani dengan urusan politik, administrasi dan perekrutan Gubernur (Wali) Hal ini juga dibahas reformasi, dalam ranah manajemen dan keuangan.<sup>244</sup>

---

<sup>244</sup> Amani Abdul Aziz *Al-idarah Fil Islam "Fi 'Ahdil Khalifah Umar ibn Abdul Aziz"* Program Pascasarjana, Fakultas Adab, Universitas Al-khurtuum, Sudan, 2008

Perbedaan antara disertasi Abdul aziz dengan dengan disertasi ini adalah bahwa Abdul Aziz membahas tentang konsep yang lebih luas yaitu Manajemen dalam perspektif islam dan dibatasi pada zaman Umar bin Abdu Aziz, sedangkan disertasi ini berfokus pada salah satu fungsi dari manajemen ditinjau dari persepektif islam dan implikasinya terhadap pendidikan.